



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Gedung PLUT Jl. H. Muhammad Siantan, Tarempa Timur, Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791, Pos-el : disperindagkop@anambaskab.go.id

Tarempa, 15 September 2025

Kepada
Yth Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
di-

Tarempa

SURAT PENGANTAR

Nomor : B/000.7.2.2/270.1 /DKUMPP/SPNG/09/2025

NO	Naskah Dinas / Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029	1(satu) Dokumen	

Diterima tanggal

Penerima,

Nama Jabatan :
.....

Pengirim,

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perdagangan dan Perindstrian
Kabupaten Kepulauan Anambas,

Nomor telepon :

Dr. Masykur, S.T., M.M.
Pembina Utama muda/IV.c
NIP 197811012003121011





RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2025 - 2029



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 266 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025-2029

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang selaras dengan pencapaian program dan kegiatan yang akan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Anggaran 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah salah satu tahapanya adalah dengan menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten

- Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2023-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 96);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 104);
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 683);
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Perangkat Daerah;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Lampiran XX : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota
4.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
5.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
6.	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai panduan strategis untuk merealisasikan program dan kegiatan yang sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor koperasi, usaha mikro, perdagangan, industri, tenaga kerja dan transmigrasi selama lima tahun ke depan.

Renstra ini memiliki peran penting sebagai acuan dalam mendorong penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan koperasi berkualitas dan modern, pemberdayaan usaha mikro yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur perdagangan dan industri daerah serta pengembangan kapasitas pencari kerja dan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Berlandaskan visi "Energi Baru 2025-2029," dokumen ini menekankan sinergi antara inovasi, penguatan daya saing, dan optimalisasi sumber daya lokal, termasuk potensi sektor maritim, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Dalam penyusunan dokumen ini, perhatian besar diberikan pada tantangan global seperti persaingan produk yang semakin ketat, lapangan kerja yang semakin sedikit akibat penggunaan *artificial intelligence*, hingga semakin tingginya tenaga kerja sektor informal. Pada dokumen ini juga memberikan tujuan dan sasaran serta program untuk menyelesaikan isu strategis khususnya terkait tantangan lokal seperti pengembangan akses pasar bagi usaha mikro di wilayah kepulauan, peningkatan daya saing produk lokal, peningkatan kapasitas SDM koperasi, UMKM, dan pencari kerja hingga perlunya jaminan sosial ketenagakerjaan .



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui ide, masukan, maupun data yang mendukung. Harapan kami, Renstra ini menjadi alat yang efektif untuk memacu pertumbuhan ekonomi berbasis inklusivitas dan keberlanjutan, serta menjadi dasar bagi terciptanya ekosistem yang kondusif bagi pengembangan koperasi, usaha mikro, perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Semoga dokumen ini membawa manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat dan mampu menjadi pendorong utama dalam membangun masa depan yang lebih cerah bagi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 15 September 2025



Dr. MASYKUR, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197811012003121011



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iv
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	14
GAMBARAN PELAYANAN	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	14
2.2 Sumber Daya Aparatur.....	25
2.3 Sumber Daya Aset.....	29
2.4 Kinerja Pelayanan	31
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	42
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis.....	47
BAB III	76
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	76
3.1 TUJUAN DAN SASARAN.....	76
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	80
BAB IV	91
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
4.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	91
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	132
BAB V.....	139
PENUTUP	139



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sumber Daya Aparatur DKUMPP	26
Tabel 2. 2 Sumber daya aparatur DKUMPP berdasarkan kualifikasi Pendidikan.....	27
Tabel 2. 3 Sumber daya aparatur berdasarkan kelamin.	28
Tabel 2. 4 Sarana dan prasarana pendukung.....	30
Tabel 2. 5 (Tabel T-C. 23) Pencapaian Kinerja Pelayanan DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.	34
Tabel 2. 6 (Tabel T-C. 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas.....	38
Tabel 2. 7 (Tabel. T-B.35.) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	53
Tabel 2. 8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	71
Tabel 3.1 (Tabel T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	78
Tabel 3. 2 Penahapan Strategi Renstra PD	82
Tabel 3. 3 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	85
Tabel 3. 4 (T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	87
Tabel 4. 1 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD..	97
Tabel 4. 2 (Tabel T-C.27) Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	112
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	128
Tabel 4. 4 (Tabel T-C.28) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	133
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas	19
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah aspek penting dalam memastikan kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum yang menegaskan perlunya sistem perencanaan yang terpadu dan terstruktur. Di tingkat daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen-dokumen ini menjadi panduan dalam menjalankan pembangunan di semua level pemerintahan.

Rencana Strategis (Renstra) adalah salah satu dokumen penting yang disusun perangkat daerah untuk periode lima tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman yang mencakup tujuan, sasaran, program, dan kegiatan strategis dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Renstra juga bersifat indikatif dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Dengan kerangka yang jelas, Renstra mengarahkan perangkat daerah untuk fokus pada pencapaian target yang telah dirumuskan dalam RPJMD, sehingga setiap langkah pembangunan memiliki arah yang tepat.

Keterpaduan antara dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. RPJPD berperan sebagai peta jalan strategis untuk 20 tahun ke depan, sedangkan RPJMD



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

merumuskan prioritas pembangunan selama lima tahun. Dokumen ini kemudian dioperasionalkan melalui RKPD yang disusun setiap tahun. Sinergi antara dokumen-dokumen ini memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Harmonisasi antara perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota juga menjadi elemen krusial. Perencanaan pembangunan di tingkat lokal harus selaras dengan kebijakan provinsi dan strategi nasional. Dengan pendekatan ini, setiap daerah tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokalnya tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Integrasi yang baik memastikan pembangunan yang serasi tanpa adanya tumpang tindih atau kesenjangan kebijakan antar-tingkat pemerintahan.

Renstra yang berkualitas memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi fungsi perangkat daerah. Dokumen ini menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk operasionalisasi perangkat daerah. Indikator yang terukur dalam Renstra mempermudah evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil menjadi lebih terarah dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Penyusunan Renstra memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirancang selaras dengan RPJMD, sehingga berdampak signifikan dan relevan bagi kebutuhan masyarakat. Koordinasi yang baik antar-sektor dan antar-tingkatan pemerintahan tercipta melalui keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam Renstra. Hal ini membantu menghindari tumpang tindih kebijakan dan memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara maksimal.



Target yang realistik dan berbasis pada kondisi nyata daerah menjadi landasan utama dalam Renstra. Pendekatan ini mendorong langkah yang terukur, namun tetap memungkinkan pencapaian yang ambisius. Selain itu, komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan implementasi Renstra. Dengan keterlibatan semua pihak, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diwujudkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 103 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 675).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DKUMPP. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Tujuan

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Merumuskan arah kebijakan strategis DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas yang sesuai dengan isu-isu strategis di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian.
2. Memastikan keterpaduan antara Renstra DKUMPP dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan kebijakan pembangunan nasional.
3. Menyediakan dasar perencanaan yang jelas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan di sektor koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian, dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).
4. Membangun sinergi yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemberdayaan koperasi, penguatan usaha mikro, serta peningkatan daya saing perdagangan dan perindustrian.
5. Mengadaptasi rencana kerja organisasi dengan perkembangan kondisi lokal, nasional, dan global untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.
6. Menjadi acuan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja DKUMPP, sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan pada setiap siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bab I ini memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini mendeskripsikan pelayanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas, Gambaran pelayanan ini mencakup tugas dan fungsi DKUMPP, sumber daya yang tersedia, baik dari segi pegawai, sarana, dan prasarana, capaian kinerja yang telah diraih, serta tantangan dan peluang yang dihadapi untuk meningkatkan pelayanan di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan. Bab ini juga memberikan gambaran mengenai permasalahan pelayanan perangkat daerah yang telah diidentifikasi dan penarikan hasil isu strategis yang aktual untuk dijadikan landasan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program perangkat daerah lima tahun kedepan. Isu-isu strategis ini diidentifikasi dari berbagai permasalahan yang ada, mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui visi, misi, dan program-program prioritasnya, serta kebijakan perencanaan yang berlaku di tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Isu-isu ini mencakup tantangan dalam pemberdayaan koperasi, pengembangan usaha mikro, penguatan perdagangan dan perindustrian, serta aspek ketenagakerjaan hingga kawasan transmigrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini secara mendalam menguraikan perumusan tujuan, sasaran yang dirancang untuk dicapai DKUMPP



dalam rentang waktu lima tahun. Perumusan ini didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap tugas pokok dan fungsi DKUMPP, serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebagai faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan hingga transmigrasi. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Pada bab ini juga dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai panduan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV menjelaskan rencana program dan kegiatan yang dirancang oleh DKUMPP untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan mencakup bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, disertai dengan indikator kinerja yang terukur, target kelompok sasaran yang jelas, serta alokasi pendanaan indikatif sebagai panduan pelaksanaannya. Rencana ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pada bab ini juga merumuskan target indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja kunci (IKK) selama lima tahun kedepan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan harapan atas Rencana Strategis DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu perangkat daerah strategis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sektor koperasi, usaha mikro, perdagangan, perindustrian, transmigrasi dan ketenagakerjaan. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021, DKUMPP menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Kepemimpinan DKUMPP berada di bawah seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan struktur organisasi yang disusun untuk menghadapi tantangan lokal dan global, DKUMPP berfungsi sebagai pelaksana kebijakan strategis pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi, ketenagakerjaan. Pelaksanaan tugas ini mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah.

DKUMPP berkomitmen untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029. Komitmen ini diwujudkan melalui penyusunan program dan kebijakan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Fokus DKUMPP meliputi penguatan kelembagaan koperasi, pemberdayaan usaha mikro, pengembangan perdagangan, peningkatan daya saing industri, dan pengelolaan



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

aspek ketenagakerjaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi teknis, DKUMPP bertanggung jawab memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Hal ini diwujudkan melalui penggunaan indikator kinerja yang terukur, relevan, dan berbatas waktu. Dengan demikian, DKUMPP memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dampak yang nyata terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, DKUMPP juga mengutamakan sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas sekaligus mendukung tujuan pembangunan nasional.

Sejalan dengan kebijakan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), DKUMPP mengintegrasikan kebijakan daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Dengan fokus pada pengembangan digitalisasi, inovasi industri, dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, DKUMPP memastikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan yang sistematis, terukur, dan berbasis kebijakan, DKUMPP terus berupaya menjadi institusi yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan program yang terarah, DKUMPP bertekad untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah yang



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas ini berfungsi:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DKUMPP;
4. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah;
6. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DKUMPP;
7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan di atas, bentuk Susunan Organisasi DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Perdagangan, membawahi:



- Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Perindustrian, membawahi:
- Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi:
- Kelompok Jabatan Fungsional;

Dalam struktur organisasi Dinas KUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas, juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Adapun UPT Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud meliputi:

1. UPT Pengelolaan Dana Bergulir;
2. UPT Metrologi Legal.

Susunan Organisasi DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif. Struktur ini terdiri dari beberapa komponen utama yang memiliki tanggung jawab dan fungsi spesifik. Kepala Dinas, sebagai pimpinan tertinggi, bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan tugas dan fungsi DKUMPP, termasuk perumusan kebijakan, pengambilan keputusan strategis, serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program di bawah dinas.

Sekretaris, yang berada di bawah Kepala Dinas, memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dukungan administrasi dan manajemen internal organisasi. Sekretaris membawahi dua sub bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang bertugas mengelola administrasi umum, kepegawaian, dan pengelolaan sarana dan prasarana, serta Sub Bagian Program dan Keuangan, yang bertanggung jawab atas perencanaan program, pengelolaan anggaran, dan penyusunan laporan keuangan serta pertanggungjawaban



administrasi.

Empat bidang utama dalam organisasi DKUMPP memiliki tugas dan fungsi khusus yang mendukung pelayanan masyarakat dan pengembangan sektor terkait. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro bertanggung jawab untuk mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro melalui pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta fasilitasi akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan. Bidang ini juga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas teknis seperti pendampingan koperasi dan usaha mikro di lapangan.

Bidang Perdagangan bertugas untuk mengelola dan mengawasi aktivitas perdagangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Fungsi utamanya meliputi pengelolaan pasar, pengawasan distribusi barang, perlindungan konsumen, dan pembinaan usaha perdagangan. Kelompok Jabatan Fungsional di bidang ini mendukung tugas teknis seperti pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Bidang Perindustrian berperan dalam pengembangan sektor industri, khususnya industri mikro, kecil dan menengah (IKM). Bidang ini bertugas memfasilitasi pelatihan, penyediaan akses teknologi, dan promosi produk unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing industri lokal. Kelompok Jabatan Fungsional di bidang ini mendukung pelaksanaan tugas teknis seperti pendampingan IKM dan evaluasi program pengembangan industri.

Terakhir, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan ketenagakerjaan dan program transmigrasi. Bidang ini melaksanakan pembinaan tenaga kerja, fasilitasi pelatihan kerja, pengawasan hubungan industrial, serta dukungan sektor

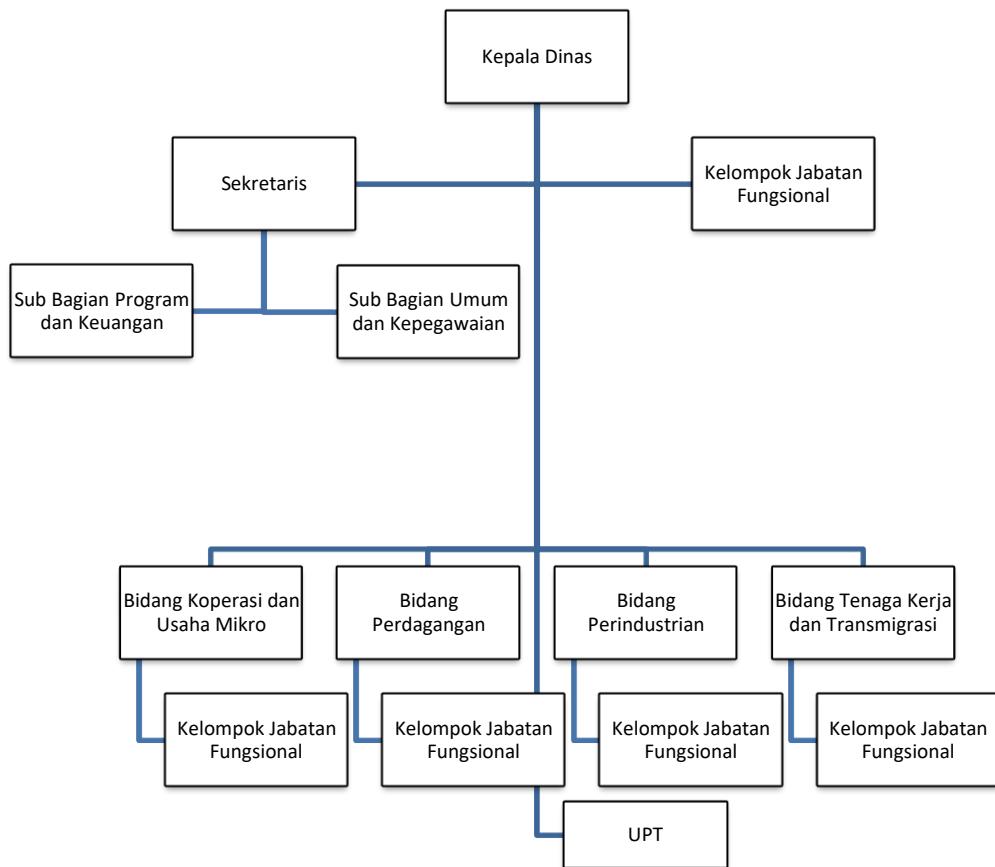


KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

transmigrasi untuk mendukung pemerataan pembangunan. Kelompok Jabatan Fungsional di bidang ini mendukung pelaksanaan tugas teknis seperti pelatihan kerja dan pendampingan transmigrasi.

Melalui struktur organisasi yang terintegrasi dan tugas serta fungsi yang jelas, DKUMPP diharapkan mampu menjalankan program-program strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas





Dalam hal membantu pelaksanaan tugas Kepala Dinas, struktur di bawahnya memiliki rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DKUMPP.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DKUMPP;
- b. koordinasi kegiatan DKUMPP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DKUMPP;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

Sekretariat membawahi:

- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan reformasi birokrasi internal DKUMPP;
 - b. melaksanakan koordinasi, peliputan, analisis



- pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. melaksanakan penanganan pengaduan terkait pelayanan DKUMPP;
 - d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
 - f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
 - g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DKUMPP;
 - h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan DKUMPP;
 - i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



II. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro membawahi kelompok Jabatan Fungsional.

III. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang



- perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perdagangan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

Bidang Perdagangan membawahi kelompok Jabatan Fungsional.

IV. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

Bidang Perindustrian membawahi kelompok Jabatan Fungsional.

V. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga



kerja dan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahi kelompok Jabatan Fungsional.

VI. UPT Pengelolaan Dana Bergulir

UPT pengelolaan dana bergulir mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPT pengelolaan dana bergulir;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT pengelolaan dana bergulir;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT pengelolaan dana bergulir;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan UPT;
- f. Menyusun bahan tugas dan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan penyaluran dana bergulir milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;



- g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan teknis UPT;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT pengelolaan dana bergulir;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengelolaan Dana Bergulir;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

VII. UPT Metrologi Legal

Adapun tugas UPT Metrologi Legal adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan satuan internasional;
- b. Pengawasan UTTP, BDKT dan satuan internasional serta penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
- c. Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium;
- d. Pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik;
- e. Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP.

2.2 Sumber Daya Aparatur

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Aparatur yang tersebar di berbagai unit kerja, mulai dari Sekretariat hingga bidang-bidang teknis seperti Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan, Perindustrian, serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi, memiliki keahlian di bidang administrasi, perencanaan, pengembangan usaha, pengelolaan pasar, pemberdayaan industri, serta pembinaan ketenagakerjaan. Sumber daya aparatur DKUMPP berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan



pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sektor-sektor strategis secara optimal, terukur, dan akuntabel.

Sumber Daya Aparatur DKUMPP per Mei 2025 berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang terdiri dari 27 Pegawai Negeri Sipil dan 21 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut:

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi aparatur DKUMPP Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Sumber Daya Aparatur DKUMPP

No	Golongan	Jabatan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda Eselon II.b	Kepala Dinas	1 orang
2	Pembina Eselon III.a	Sekretaris	1 orang
3	Eselon III.b	Kepala Bidang	4 orang
4	Eselon IV.a	Kasubbag / Ka. UPT	4 orang
5	Eselon IV.b	Kasubbag TU UPT	2 orang
6	Penata Tk. I	Fungsional	3 orang
7	Penata	Pelaksana	1 orang
8	Penata Muda Tk. I	Pelaksana	3 orang
9	Penata Muda	Pelaksana	6 orang
10	Penata Muda	Fungsional	1 orang
11	Pengatur Tk. I	Pelaksana	1 orang
12	PPPK	Fungsional	7 orang
13	PPPK	Struktural	14 orang
Jumlah			48 orang

Sumber daya aparatur di DKUMPP berdasarkan kualifikasi golongan dan jabatan menunjukkan distribusi yang beragam. Pada level tertinggi, terdapat 1 orang pada golongan Pembina Utama Muda dengan jabatan Eselon II.b. Golongan Pembina, yang menjabat Eselon III.a, diisi oleh 1 orang.



Selanjutnya, pada golongan Penata Tk.I dengan jabatan Eselon III.b terdapat 4 orang. Jabatan Eselon IV.a diisi oleh 2 orang dari golongan Penata dan 2 orang dari golongan penata Tingkat I serta jabatan eselon IV.b diisi oleh 2 orang dari golongan Penata.

Pada posisi staf, terdapat distribusi yang lebih besar, yakni 3 orang pada golongan Penata Tk.I, 1 orang golongan Penata, 3 Orang golongan Penata Muda Tk.I, 6 Orang golongan Penata Muda. Sedangkan Pengatur Muda Tingkat I sebanyak 1 orang , serta 21 orang tenaga PPPK. Perlu disampaikan juga bahwa pada tahun 2024 telah dilakukan rekrutmen PPPK tahap II sebanyak 7 orang, yang belum dilantik, sehingga nantinya saat 7 orang tersebut dilantik, maka jumlah keseluruhan pegawai DKUMPP adalah sebanyak 55 orang.

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai DKUMPP tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Sumber daya aparatur DKUMPP berdasarkan kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1 ASN : 48 Orang		S3 : 1 Orang
		S2 : 1 Orang
		S1 : 34 Orang
		D3 : -
		SMA/SMK : 12 Orang
Jumlah		48 Orang

Dari total 48 orang Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), 1 orang memiliki kualifikasi pendidikan S3, 1 orang



memiliki kualifikasi pendidikan S2, 34 orang berpendidikan S1 atau D4, dan 12 orang merupakan lulusan SMA atau SMK.

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor DKUMPP didominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur PNS dan tenaga PPPK berdasar kelamin.

Tabel 2. 3. Sumber daya aparatur berdasarkan kelamin.

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
ASN	26	22
Jumlah	26	22

Sumber daya aparatur berdasarkan jenis kelamin di lingkungan DKUMPP terdiri atas 48 orang, dengan rincian 26 orang laki-laki dan 22 orang perempuan.

Komposisi sumber daya aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, yang terdiri dari 26 laki-laki dan 22 perempuan, mencerminkan upaya nyata menuju kesetaraan gender dalam organisasi. Keseimbangan ini menunjukkan komitmen DKUMPP untuk memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pegawai tanpa memandang gender, sehingga menciptakan fondasi yang kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih kokoh di masa depan.

Kesetaraan gender dalam organisasi menjadi elemen penting untuk meningkatkan kinerja, karena memberikan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk



berkontribusi sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya. Langkah ini mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif, memperkaya perspektif, serta mendorong inovasi dan kolaborasi dalam setiap aspek kerja organisasi. Dengan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan profesionalisme, DKUMPP tidak hanya memperkuat pelayanan publik tetapi juga memastikan bahwa seluruh pegawai dapat berperan aktif dalam mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

2.3 Sumber Daya Aset

Kinerja organisasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sangat bergantung pada dukungan sumber daya aset, terutama sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana yang memadai, seperti ruang kerja yang nyaman, teknologi informasi yang canggih, serta fasilitas pendukung lainnya, memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan sarana dan prasarana yang baik, pelaksanaan tugas menjadi lebih mudah, cepat, dan efektif, yang pada akhirnya berdampak positif pada pencapaian target organisasi. Selain itu, fasilitas yang menunjang juga berkontribusi dalam meningkatkan motivasi dan kepuasan pegawai, sehingga mendorong loyalitas serta dedikasi mereka dalam mendukung tujuan DKUMPP.

Sarana dan prasarana yang berkualitas juga menjadi faktor kunci dalam menjaga standar pelayanan yang diberikan DKUMPP, baik kepada masyarakat maupun kepada pelaku usaha. Fasilitas yang baik memungkinkan proses kerja berjalan lancar, sekaligus mengurangi risiko gangguan operasional yang dapat memengaruhi kualitas



layanan. Keberadaan alat dan teknologi yang tepat mendukung pengambilan keputusan strategis secara lebih cepat dan akurat. Hal ini sangat relevan dalam konteks DKUMPP yang memiliki tanggung jawab di sektor koperasi, usaha mikro, perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja, di mana keberlanjutan pelayanan publik menjadi prioritas utama.

Penyediaan fasilitas sesuai standar menjadi salah satu prioritas DKUMPP dalam mendukung efisiensi kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kombinasi antara distribusi aparatur yang merata, pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan perekruit, serta optimalisasi sarana dan prasarana, diharapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan tersebut, DKUMPP mampu mengimplementasikan program-program strategis yang selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah secara optimal.

Tabel 2. 4. Sarana dan prasarana pendukung.

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	15 Unit	10 Baik, 5 Rusak Berat
2	Printer	15 Unit	Baik
3	PC	17 Unit	15 Baik, 2 Rusak Ringan
6	Meja Rapat	1 Unit	Rusak Ringan
7	Meja Kerja Eselon II	1 Buah	Baik
8	Meja Kerja Eselon III	5 Buah	Baik
9	Meja Kerja Non Struktural	24 Buah	Baik
10	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10 Buah	Baik
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	Baik



No	Uraian	Jumlah	Keterangan
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	Baik
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5 Buah	Baik
16	Kursi Tamu	2 Set	Baik
17	Lemari Arsip	15 Buah	Baik
18	Proyektor	1 Buah	Baik
20	Kursi Kerja Putar	14 Unit	Baik
22	Lemari Buku	1 Unit	Baik
23	A.C	14 Unit	Baik
24	Brankas	3 Unit	Baik
25	Mobil DoubleCabin	1 Unit	Baik
26	Mobil Pick Up	1 Unit	Baik
27	Kendaraan Roda 3	2 Unit	1 Baik, 1 Rusak Berat
28	Scanner	2 Unit	Baik
29	Sound System	1 Unit	Baik
30	Sepeda Motor	17 Unit	15 Baik, 2 Rusak Ringan

2.4 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mencerminkan kemampuan organisasi dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya. Sebagai institusi yang berfokus pada pengembangan ekonomi lokal, DKUMPP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan, baik dalam bentuk pembinaan, fasilitasi, maupun pendampingan, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Kinerja pelayanan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk responsivitas terhadap kebutuhan pengguna layanan, kecepatan proses pelayanan, serta transparansi dalam pelaksanaannya.

Fokus pada kinerja pelayanan DKUMPP juga



melibatkan pengelolaan yang terstruktur dan koordinasi yang baik di antara unit-unit kerja di dalamnya. Setiap bidang, mulai dari Koperasi dan Usaha Mikro hingga Tenaga Kerja dan Transmigrasi, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan sesuai dengan fungsi masing-masing. Pelayanan yang baik tercermin dari kemampuan DKUMPP dalam mengintegrasikan sistem operasional yang mendukung pelayanan prima, menciptakan prosedur yang sederhana namun efektif, dan memberikan kepastian hukum serta keadilan dalam setiap layanan yang diberikan.

Peningkatan kinerja pelayanan DKUMPP juga bergantung pada optimalisasi sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung. Aparatur yang kompeten dan profesional menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang memuaskan, sementara sarana yang memadai memastikan kelancaran proses operasional. Komitmen DKUMPP dalam menyediakan layanan yang responsif dan akuntabel berkontribusi langsung pada kepuasan pengguna layanan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Perspektif kinerja pelayanan DKUMPP tidak hanya berfokus pada pencapaian target internal, tetapi juga pada dampak nyata bagi masyarakat. Pelayanan yang efisien, efektif, dan akuntabel menciptakan nilai tambah bagi pengguna layanan, mendukung perkembangan sektor ekonomi lokal, serta mendorong terciptanya lingkungan usaha yang kondusif. Dengan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkelanjutan, DKUMPP berperan aktif



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan DKUMPP pada periode 2021-2026, yaitu:



Tabel 2. 5. (Tabel T-C. 23) Pencapaian Kinerja Pelayanan DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase UMKM Naik Kelas	-	-	-	33%	38%	39%	40%	43%	46%				60%			0.00 %	0.00 %	0.00 %	150.00%		
2	Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir	-	-	-	10%	25%	43,3 3%	63,3 3%	83,3 3%	100 %	12.6 7%	31%	62%	0%			126.70%	124.00%	-	-		
3	Persentase Sektor Perindustrian terhadap PDRB tanpa migas berdasarkan harga berlaku	-	-	-	0,16	0,2	0,24	0,28	0,32	0,36							-	-	-	-		
4	Persentase Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB tanpa migas berdasarkan harga berlaku	-	-	-	2,97	3,07	3,17	3,27	3,37	3,47							-	-	-	-		
5	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	5	10	15	20	25	30	5	5	5	60			100.00%	50.00%	33.33%	300.00%		



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Tingkat stabilitas harga barang	-	-	-	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.84	0.43	0.42	0.2			118.31%	60.56%	59.15%	28.17%			
7	Nilai RB Perangkat Daerah				CC/5 6,8	CC/5 7	CC/5 7,2	CC/5 7,4	CC/5 7,6	CC/5 7,7							-	-	-	-			
8	Nilai AKIP Perangkat Daerah				B/69	B/69,5	B/70	B/70,5	B/71	B/71,5		CC/5 4.26	B/63 .76	B/67 .21			-	78.07%	91.09%	95.33%			
9	Nilai IKM Perangkat Daerah				A/94,78	A/94,79	A/94,8	A/94,81	A/94,82	A/94,83	79.75	0	NA	92.25			84.14%	-	-	97.30%			



Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun 2021–2026 ditargetkan memenuhi sejumlah indikator strategis yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Indikator kinerja ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pemberdayaan usaha mikro dan kecil, akses pendanaan, kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB, hingga stabilitas harga barang serta penilaian tata kelola pemerintahan.

Salah satu indikator utama adalah persentase usaha mikro dan kecil yang naik kelas, dengan target peningkatan bertahap dari 33 persen pada tahun 2021 menjadi 46 persen pada tahun 2026. Indikator ini menunjukkan keberhasilan program DKUMPP dalam meningkatkan kapasitas dan skala usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pembinaan, pelatihan, serta fasilitasi akses pasar dan teknologi. Selain itu, persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir menjadi prioritas penting dalam memperluas dukungan keuangan bagi usaha mikro dan kecil. Target peningkatan dimulai dari 10 persen pada tahun 2021 hingga mencapai 100 persen pada tahun 2026, mencerminkan komitmen DKUMPP dalam memperkuat akses permodalan untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Dari sisi kontribusi ekonomi, target persentase sektor perindustrian terhadap PDRB tanpa migas ditetapkan meningkat dari 0,16 persen pada tahun 2021 menjadi 0,36 persen pada tahun 2026. Di sisi lain, persentase sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB tanpa migas juga diharapkan mengalami peningkatan dari 2,97 persen pada tahun 2021 menjadi 3,47 persen pada tahun 2026. Kedua indikator ini menjadi tolok ukur penting keberhasilan DKUMPP dalam mengembangkan peran sektor industri dan perdagangan



sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Selain itu, persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan, yang ditargetkan bertambah dari 5 unit pada tahun 2021 menjadi 30 unit pada tahun 2026, menggambarkan upaya DKUMPP dalam memperkuat infrastruktur perdagangan untuk memastikan distribusi barang yang lebih efisien.

Dari perspektif stabilitas ekonomi, tingkat stabilitas harga barang ditargetkan tetap terjaga pada angka 0,71 selama periode 2021–2026. Stabilitas ini mencerminkan keberlanjutan upaya pengendalian inflasi melalui pengawasan dan koordinasi yang konsisten. Selain itu, kinerja internal DKUMPP juga diukur melalui indikator tata kelola, seperti nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang ditargetkan meningkat dari CC/56,8 pada tahun 2021 menjadi CC/57,7 pada tahun 2026, serta nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang meningkat dari B/69 pada tahun 2021 menjadi B/71,5 pada tahun 2026. Di sisi lain, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan DKUMPP, dengan peningkatan bertahap dari A/94,78 pada tahun 2021 hingga A/94,83 pada tahun 2026.

Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut mencerminkan upaya DKUMPP dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat sektor ekonomi lokal, dan memastikan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Pencapaian target ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DKUMPP, yaitu



Tabel 2. 6. (Tabel T-C. 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas.

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program Penempatan Tenaga Kerja	-	-	74,679,272	-	-	-	-	-	40,679,047	-	-	-	-	-	54.47%	-	-	0	0	
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,312,277,000	300,860,000	-	-	-	-	913,115,545	248,812,000	-	-	-	-	69.58%	82.70%	-	-	(59.02%)	(57.58%)		
Program Hubungan Industrial	1,008,279,500	2,266,966,566	1,864,957,900	1,010,699,400	-	-	791,157,610	1,509,097,832	1,570,557,077	825,759,393	-	-	78.46%	66.56%	84.21%	81.70%	-	-	20.43%	15.80%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,074,306,950	7,347,115,412	10,445,953,979	9,414,875,340	-	-	6,451,558,545	6,792,430,735	7,712,837,034	7,239,729,844	-	-	91.20%	92.45%	73.84%	76.90%	-	-	12.5%	4.23%
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	93,809,000	25,643,000	20,000,000	-	-	-	93,645,500	15,331,400	-	-	-	-	99.83%	59.79%	-	-	-	-	(64.89%)	(61.21%)
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	189,393,000	98,425,000	204,021,522	76,222,208	-	-	46,854,000	74,155,000	200,620,522	65,450,000	-	-	24.73%	75.34%	98.28%	85.87%	-	-	(1.13%)	53.81%
	793,175,400	386,012,550	103,422,165	702,294,211	-	-	571,910,600	236,942,750	48,745,386	536,767,704	-	-	72.10%	61.38%	47.13%	76.43%	-	-	151.5%	287.72%



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan UMKM																				
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	80,321,500	99,240,720	99,646,660	37,004,802	-	-	60,804,000	95,842,070	72,902,706	34,456,103	-	-	75.70%	96.58%	73.16%	93.11%	-	-	(12.97%)	(6.35%)
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	416,182,362	-	-	390,000,000	-	-	348,053,162	-	-	190,396,160	-	-	83.63%	-	-	48.82%	-	-	0	0
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	428,363,500	653,145,105	151,820,400	69,453,000	-	-	85,203,193	412,735,065	137,875,000	60,024,000	-	-	19.89%	63.19%	90.81%	86.42%	-	-	(26.18%)	(87.12%)
Program Pengembangan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	5,658,000	33,559,440	67,631,400	-	-	-	5,658,000	28,617,775	63,677,400	-	-	-	100.00%	85.27%	94.15%	-	-	-	164.89%	142.77%
	12,030,054,080	2,136,900,725	-	563,979,327	-	-	8,782,143,014	2,085,561,716	-	133,415,849	-	-	73.00%	97.60%	-	23.66%	-	-	(27.41%)	(25.42%)



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri																				
Program Pengendalian Izin Usaha Industri		-	51,577,000	-	-	-	-	-	38,280,341	-	-	-	-	-	74.22%	-	-	-	0	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menangani sektor koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian. Pemahaman terhadap elemen-elemen ini sangat penting untuk merumuskan strategi pembangunan yang tepat guna menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Kekuatan DKUMPP terletak pada beberapa aspek, seperti keberadaan produk lokal bermerek yang telah dikenal luas, di antaranya Loti Gendang, Cual, Kerupuk Atom, dan Kerupuk Ikan, yang menjadi keunggulan daerah. Selain itu, DKUMPP juga didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian, fasilitas kerja yang memadai, sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dilengkapi peralatan yang baik, serta jaringan internet yang semakin baik untuk mendukung operasional. Elemen-elemen ini memberikan fondasi kuat bagi DKUMPP dalam meningkatkan daya saing daerah.

Di lain sisi, kelemahan DKUMPP mencakup sejumlah tantangan internal, seperti kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pembina, lemahnya sistem pendataan dan administrasi, distribusi pegawai yang tidak merata, serta kurang optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana. Selain itu, kesadaran pelaku usaha dalam memberikan informasi dan melakukan diversifikasi produk masih rendah, dan banyak sektor koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian (KUM dan Indag) yang belum naik kelas. Biaya operasional yang tinggi, lemahnya koordinasi antar lembaga pembina UKM, serta minimnya pemanfaatan



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

internet untuk promosi produk lokal juga menjadi kendala utama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Dari perspektif eksternal, DKUMPP menghadapi berbagai ancaman, termasuk kondisi geografis yang membatasi pembinaan, perubahan regulasi yang sering terjadi, ketimpangan ekonomi antardaerah, serta biaya transportasi yang tinggi. Tantangan lain mencakup minimnya produk industri kecil dan menengah (IKM) yang bersertifikat halal, tingginya biaya pengujian kandungan gizi, dan dampak pandemi yang memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, adanya tumpang tindih tugas dengan instansi lain dan kesenjangan upah kerja antarorganisasi perangkat daerah (OPD) turut mempersulit optimalisasi kinerja DKUMPP.

Di sisi lain, peluang yang dimiliki DKUMPP sangat besar untuk dimanfaatkan. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbatasan dengan wilayah lebih maju dan kawasan ekonomi khusus seperti Batam, Bintan, dan Karimun memberikan potensi besar untuk pengembangan ekonomi. Kebijakan otonomi daerah dan regulasi yang mendukung pelaku KUM dalam membangun usaha membuka jalan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sub sektor usaha mikro dan kecil, perdagangan, dan perindustrian memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi sistem ekonomi yang lebih kuat, sementara hasil perikanan, perkebunan, dan pertanian dapat diarahkan menuju agroindustri yang berdaya saing. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan sistem perdagangan daring membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar.



1. Tantangan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari kondisi internal maupun eksternal yang memengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sektor koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian.

a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah:

- 1.** Kapasitas dan kapabilitas aparatur yang belum memadai, terutama dalam pembinaan koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan tugas.
- 2.** Sistem pendataan dan administrasi yang belum optimal, menyebabkan kurangnya akurasi data dan pengambilan keputusan yang kurang berbasis bukti.
- 3.** Komposisi distribusi pegawai yang belum seimbang, yang berdampak pada kurangnya efektivitas pelayanan di lapangan.
- 4.** Kurangnya koordinasi antarunit kerja internal dan lemahnya disiplin pegawai, yang dapat menurunkan kinerja organisasi secara keseluruhan.
- 5.** Pengelolaan sarana dan prasarana yang belum optimal, meskipun fasilitas yang tersedia sudah lebih baik dibanding sebelumnya.
- 6.** Tingginya biaya operasional untuk pembinaan ekonomi masyarakat yang belum sebanding dengan hasil yang dicapai.
- 7.** Kurangnya pemahaman pelaku koperasi dan usaha mikro terhadap diversifikasi produk dan pengelolaan keuangan, yang menghambat mereka untuk naik



kelas.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, DKUMPP juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu:

1. Kondisi geografis Kepulauan Anambas yang tersebar, menyulitkan akses untuk pembinaan dan pelayanan secara merata.
2. Perubahan regulasi di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian yang sering kali terjadi, menimbulkan kebingungan dalam implementasi kebijakan.
3. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah, yang memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan memanfaatkan peluang pasar.
4. Ketimpangan ekonomi antara daerah yang lebih maju dan daerah yang tertinggal, yang mempersulit pemerataan pembangunan.
5. Besarnya biaya transportasi untuk distribusi barang, baik di dalam maupun ke luar daerah, yang memengaruhi daya saing produk lokal.
6. Rendahnya standar kemasan dan minimnya sertifikasi halal serta pengujian kandungan gizi pada produk lokal, yang membatasi daya saing produk di pasar yang lebih luas.
7. Dampak pandemi yang memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha, memperbesar ketergantungan pada bantuan pemerintah.



2. Peluang

DKUMPP juga memiliki sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan sektor koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian, antara lain:

1. Letak geografis strategis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbatasan dengan wilayah maju seperti Batam, Bintan, dan negara tetangga, memberikan peluang untuk memperluas pasar dan kerja sama ekonomi.
2. Kebijakan otonomi daerah memberikan fleksibilitas dalam merancang regulasi lokal untuk mendukung koperasi, usaha mikro, dan sektor industri.
3. Tersedianya teknologi informasi dan perdagangan daring yang berkembang pesat, membuka peluang promosi produk lokal ke pasar yang lebih luas.
4. Dukungan pendanaan untuk pengelolaan dana bergulir, yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat modal pelaku usaha mikro.
5. Adanya potensi besar dari sub sektor koperasi, usaha mikro, dan perindustrian untuk dikembangkan menjadi sistem ekonomi yang lebih kokoh, termasuk agroindustri berbasis hasil perikanan, perkebunan, dan pertanian.
6. Komitmen pemerintah dan stakeholder untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan publik, menciptakan kepercayaan masyarakat dalam mendukung program DKUMPP.
7. Jumlah pelaku IKM yang signifikan, yaitu sebanyak 756 unit, memberikan peluang besar untuk dibina dan dikembangkan menjadi pelaku usaha yang lebih kompetitif.



8. Adanya dukungan dari lembaga keuangan bank dan non-bank, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro dan industri untuk mendapatkan akses pendanaan yang lebih luas.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, senantiasa dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memengaruhi kinerja organisasi. Isu-isu ini mencakup berbagai kondisi, situasi, atau peristiwa yang berkembang di lingkungan internal maupun eksternal, yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tantangan dan peluang yang muncul dari lingkungan sekitar perlu dikelola dengan baik untuk memastikan kinerja DKUMPP tetap optimal dan mampu memenuhi harapan masyarakat serta pemerintah daerah.

Isu-isu strategis ini tidak hanya terkait dengan faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah, dinamika regulasi di sektor koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian, serta ketimpangan akses pasar di wilayah kepulauan, tetapi juga mencakup faktor internal yang melibatkan sumber daya manusia, infrastruktur organisasi, dan sistem operasional yang ada. Misalnya, perubahan regulasi yang sering kali terjadi dapat memengaruhi pelaksanaan program DKUMPP, sementara isu internal seperti kurangnya kapasitas aparatur pembina atau kelemahan sistem pendataan dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas. Untuk itu, DKUMPP perlu memahami isu-isu strategis ini secara menyeluruh dan meresponsnya dengan strategi adaptif serta berbasis data yang akurat.



Selain itu, tantangan geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari banyak pulau terpisah menjadi salah satu isu utama yang memengaruhi efektivitas pelayanan DKUMPP. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang inovatif dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian secara merata. Koordinasi yang baik dengan lembaga lain dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci untuk mengatasi hambatan geografis serta memperluas jangkauan pelayanan.

Peluang besar juga terbuka bagi DKUMPP melalui dukungan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi informasi, serta potensi lokal seperti hasil perikanan, perkebunan, dan pertanian yang dapat diolah menjadi produk unggulan daerah. Pemanfaatan peluang ini secara maksimal, melalui strategi yang inklusif dan berkelanjutan, dapat membantu DKUMPP mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan mengelola isu-isu strategis tersebut secara efektif, DKUMPP mampu mendukung pembangunan ekonomi lokal yang lebih kuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terutama terkait pengembangan koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian. Seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah, permasalahan ini menjadi semakin kompleks dan berdampak langsung pada pencapaian tujuan DKUMPP dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan tersebut mencakup upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro, peningkatan akses terhadap sumber permodalan,



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

pemanfaatan teknologi dalam mempromosikan produk lokal, serta penyusunan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor perdagangan dan industri.

Isu-isu yang dihadapi DKUMPP juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari banyak pulau terpencil, sehingga menyulitkan pemerataan pelayanan dan pembinaan pelaku usaha. Perubahan regulasi yang kerap terjadi di sektor koperasi dan perdagangan turut menambah beban dalam pelaksanaan program. Selain itu, rendahnya kapasitas pelaku usaha dalam diversifikasi produk serta pengelolaan bisnis menjadi kendala signifikan yang memengaruhi daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Ketimpangan ekonomi antara wilayah yang lebih maju dan daerah tertinggal di kabupaten ini juga menambah kompleksitas permasalahan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, DKUMPP perlu beradaptasi dengan perubahan yang ada dan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas internal organisasi. Peningkatan kompetensi aparatur pembina, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi produk lokal harus menjadi prioritas. Sinergi dengan lembaga keuangan, sektor swasta, dan instansi terkait lainnya juga penting untuk menciptakan solusi kolaboratif dalam mengatasi kendala yang ada. Dengan pendekatan ini, DKUMPP dapat memperkuat daya saing sektor koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di Kabupaten Kepulauan Anambas.

1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menghadapi berbagai tantangan yang meliputi:



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Kurangnya Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro

Banyak pengurus koperasi yang belum memahami tata kelola organisasi secara profesional, termasuk manajemen keuangan dan strategi pemasaran. Hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran anggota koperasi untuk melaksanakan kewajiban mereka, seperti pembayaran iuran dan keterlibatan aktif dalam kegiatan koperasi.

- Minimnya Akses terhadap Lembaga Keuangan

Pelaku usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pendanaan dari lembaga keuangan. Rendahnya literasi keuangan dan kurangnya jaminan yang dimiliki menjadi kendala utama dalam mendapatkan kredit atau pinjaman usaha:

- Tingginya Biaya Produksi dan Transportasi

Sebagai wilayah kepulauan, ongkos produksi dan transportasi di Kabupaten Kepulauan Anambas relatif tinggi. Hal ini berdampak pada daya saing produk koperasi dan usaha mikro, terutama untuk produk yang dipasarkan di luar daerah.

- Pemanfaatan Teknologi yang Masih Rendah

Pelaku usaha mikro dan koperasi belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk pemasaran produk mereka, seperti melalui e-commerce atau media sosial. Hal ini menghambat perluasan pasar, terutama untuk produk lokal unggulan.



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan di DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas juga menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas perdagangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi:

- Standar Produk Lokal yang Belum Memadai

Banyak produk perdagangan lokal yang belum memenuhi standar kemasan, sertifikasi halal, atau pengujian kandungan gizi. Hal ini menjadi hambatan untuk memasarkan produk lokal ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

- Ketimpangan Infrastruktur Distribusi

Ketersediaan sarana distribusi perdagangan yang belum merata menyebabkan kendala dalam pendistribusian barang, terutama ke pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha dalam Pelaporan

Banyak pelaku usaha yang belum memberikan informasi usaha secara terperinci, sehingga menyulitkan proses pendataan dan pembinaan oleh pemerintah daerah.

3. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian di DKUMPP memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun, tantangan berikut perlu segera diatasi:

- Minimnya Sentra Industri yang Berkembang

Meskipun terdapat sentra industri kecil dan menengah yang dilengkapi dengan peralatan, pengelolaannya belum



optimal. Kurangnya pembinaan teknis dan pendampingan menjadi penyebab utama.

- Produk IKM yang Belum Kompetitif

Sebagian besar produk IKM belum mampu bersaing di pasar, baik dari segi kualitas maupun harga. Diversifikasi produk juga masih minim, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar yang lebih beragam.

4. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi di DKUMPP bertanggung jawab dalam pengelolaan ketenagakerjaan dan program transmigrasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Tantangan utama yang dihadapi meliputi:

- Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Tenaga Kerja

Sebagian besar tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang terbatas, sehingga sulit memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, terutama untuk sektor-sektor tertentu.

- Keterbatasan Program Transmigrasi

Program transmigrasi merupakan program pemerintahan terdahulu dari pusat yang belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pemerataan penduduk dan pengelolaan sumber daya di wilayah-wilayah tertentu, terutama di pulau-pulau kecil yang membutuhkan tenaga kerja tambahan.

Selanjutnya, untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang efektif, perlu dilakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi. Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:

Tabel 2. 7 (Tabel. T-B.35.) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Koperasi dan Usaha Mikro	Rendahnya kapasitas pengurus koperasi dan pelaku usaha mikro	Kurangnya pembinaan dan pelatihan; rendahnya literasi keuangan
2		Minimnya akses terhadap lembaga keuangan bagi pelaku usaha mikro	Rendahnya literasi keuangan dan kurangnya jaminan untuk akses kredit
3	Perdagangan	Kurangnya standar produk lokal	Produk belum memiliki sertifikasi halal, kemasan tidak standar
4		Ketimpangan infrastruktur distribusi perdagangan	Kurangnya infrastruktur distribusi yang memadai di pulau-pulau kecil
5	Perindustrian	Minimnya sentra industri yang berkembang	Kurangnya pembinaan teknis dan pendampingan usaha
6		Produk IKM yang belum kompetitif di pasar	Minimnya inovasi dan diversifikasi produk oleh pelaku IKM
7	Ketenagakerjaan	Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dan tingginya pekerja sektor informal	Minimnya akses pelatihan kerja dan sertifikasi profesi



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
8	Transmigrasi	Ketidakjelasan aset program transmigrasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat	Kewenangan kabupaten sangat terbatas

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi priode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu:

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis,
Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan
Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam empat (5) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif;
4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata;
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DKUMPP berperan penting dalam mewujudkan beberapa misi kepala daerah, terutama misi ke-3 yaitu "Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif, kemudian pada misi ke-4 yaitu "Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata dan misi ke-5 "Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan".

Dalam mendukung misi ke-3 menjadi elemen krusial dalam memastikan DKUMPP mampu memberikan layanan yang responsif, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat serta pelaku usaha. Reformasi birokrasi dalam konteks DKUMPP mencakup penyederhanaan prosedur pelayanan, pengembangan sistem informasi berbasis digital untuk pengelolaan data koperasi dan usaha mikro, serta peningkatan kompetensi aparatur. Pelayanan yang optimal tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna tetapi juga mendukung percepatan pelaksanaan program strategis DKUMPP secara efektif.

Pada misi ke-4, DKUMPP berfokus pada peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan koperasi, usaha mikro, dan industri kecil menengah (IKM). Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi akses permodalan, diversifikasi produk, serta pengembangan infrastruktur perdagangan dan industri yang merata di seluruh wilayah kepulauan. Infrastruktur seperti pasar, sentra IKM, dan fasilitas distribusi yang memadai menjadi kunci untuk memastikan pemerataan pembangunan ekonomi serta mendorong penguatan potensi ekonomi lokal.

DKUMPP juga berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi berbasis maritim, yang mencakup pemanfaatan hasil perikanan, perkebunan, dan pertanian untuk mendukung agroindustri yang berdaya saing. DKUMPP juga memfasilitasi promosi produk lokal, baik di tingkat nasional maupun



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

internasional, dengan memanfaatkan teknologi digital seperti e-commerce dan platform pemasaran daring. Hal ini sejalan dengan visi "unggul di bidang maritim" dan "inovatif," di mana DKUMPP mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Selain itu DKUMPP juga berperan dalam langkah-langkah konkret dengan bersinergi terhadap pemangku kepentingan dalam menekan angka tingkat pengangguran yaitu sesuai pada misi ke-5.

DKUMPP juga berfokus kepada peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan, pembiayaan, kemampuan manajemen, pengolahan logistik bahan pangan, serta meningkatkan akses pasar produk UMKM, dan sertifikasi produk UMKM, selain itu DKUMPP juga melakukan pendataan dan pemutakhiran jumlah penduduk yang perlu diberikan bantuan untuk menerima perlindungan sosial seperti iuran BPJS ketenagakerjaan kepada nelayan, petani, dan buruh lepas.

3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

- **Kementerian Koperasi dan UMKM**

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada visi dan misi Presiden yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Renstra ini dirancang untuk menjalankan amanat Presiden serta mendukung pencapaian kinerja yang lebih optimal dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Dalam lima tahun ke depan, visi Kemenkop UKM diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya, yaitu menciptakan koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat, dan mandiri guna mendukung struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Berdasarkan visi tersebut, Kemenkop UKM menetapkan dua



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

misi utama sebagai fokus pelaksanaan program. Misi pertama adalah mewujudkan koperasi generasi baru yang maju dan modern. Misi kedua adalah menciptakan UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global. Kedua misi ini menjadi landasan bagi berbagai upaya strategis dalam memperkuat peran koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, tujuan pengembangan koperasi dan UMKM selama periode 2025-2029 diarahkan pada tiga sasaran utama. Sasaran pertama adalah terwujudnya koperasi generasi baru yang maju dan modern dengan hasil berupa modernisasi koperasi dan lahirnya wirausaha baru. Sasaran kedua adalah terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global melalui integrasi ke dalam Global Value Chains (GVC) dan peningkatan skala usaha (scaling up). Sasaran ketiga adalah terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi dengan indikator peningkatan indeks reformasi birokrasi serta nilai akuntabilitas kinerja.

Melalui visi, misi, dan sasaran strategis ini, Kemenkop UKM berkomitmen untuk memperkuat ekosistem koperasi dan UMKM, memastikan modernisasi kelembagaan, meningkatkan daya saing produk, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong terciptanya struktur ekonomi yang lebih kokoh dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Dari penjabaran visi dan misi Kementerian tersebut, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan Strategis

1. Pengelolaan fisikal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Pengelolaan belanja Negara yang berkualitas.



b. Sasaran Strategis

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam ujuan Pengelolaan Fisikal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fisikal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.

Arah Kebijakan:

1. Pengelolaan fisikal yang sehat dan berkelanjutan.
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fisikal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fisikal yang ekspansif konsolidatif;
2. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.
Kondisi yang ingin dicapai adalah dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat;

• **Kementerian Perdagangan RI**

Kementerian Perdagangan menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029 dengan mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Visi Kementerian Perdagangan adalah "Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Sebagai penggerak utama pertumbuhan dan daya saing ekonomi, Kementerian Perdagangan berkomitmen mendukung misi Presiden melalui peningkatan kinerja ekspor non-migas,



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

penguatan perdagangan dalam negeri, serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kementerian Perdagangan berperan dalam beberapa misi Presiden, di antaranya mendukung pendidikan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, memfasilitasi ekonomi digital, dan memperkuat infrastruktur logistik. Dalam mendukung struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing, Kementerian memprioritaskan pengembangan pasar ekspor baru, pemanfaatan teknologi, dan perlindungan konsumen. Selain itu, melalui misi pembangunan yang merata, kementerian mendorong peningkatan produktivitas UMKM, pengembangan ekonomi kerakyatan, dan pemerataan ekonomi antarwilayah.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Kementerian Perdagangan fokus pada pengawasan impor barang berbahaya, mendukung produk ramah lingkungan, serta mengembangkan pasar rakyat berbasis kesehatan dan kebersihan. Selain itu, kementerian juga berperan aktif dalam diplomasi ekonomi untuk memperkuat kerja sama perdagangan internasional dan memperluas pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional.

Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Perdagangan berkomitmen meningkatkan indeks reformasi birokrasi, memperkuat manajemen kinerja, dan memastikan setiap proses anggaran berjalan transparan dan akuntabel. Dalam hal kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian memprioritaskan stabilisasi harga barang pokok, pembangunan sarana perdagangan, serta peningkatan ekspor produk lokal.

Tujuan strategis Kementerian Perdagangan dalam lima tahun ke depan meliputi peningkatan ekspor non-migas, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, pemberdayaan konsumen, dan pengembangan pasar produk dalam negeri. Untuk mencapai



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

tujuan tersebut, sasaran strategis yang ditetapkan antara lain peningkatan pertumbuhan ekspor barang non-migas, optimalisasi peranan perdagangan berjangka, serta peningkatan kapabilitas SDM perdagangan. Seluruh sasaran ini diintegrasikan dengan kebijakan strategis seperti pengamanan pasar ekspor, penguatan distribusi barang pokok, dan peningkatan integritas serta pelayanan publik.

Dengan strategi yang komprehensif, Kementerian Perdagangan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan struktur perdagangan yang berdaya saing, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Indonesia. Program dan kebijakan yang disusun juga telah disesuaikan untuk menghadapi tantangan, termasuk dampak pandemi Covid-19, sehingga tetap relevan dan responsif terhadap dinamika perekonomian global.

- **Kementerian Perindustrian RI**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menempatkan penguatan ketahanan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia sebagai prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan yang berkualitas. Dalam mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong," Kementerian Perindustrian memiliki visi serupa, yaitu mewujudkan industri tangguh yang mampu mengelola sumber daya secara mandiri dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, investasi, dan ekspor sektor industri untuk bersaing di tingkat global.

Implementasi visi ini mencakup pemanfaatan teknologi dan inovasi melalui program Making Indonesia 4.0 yang bertujuan mengoptimalkan sumber daya alam dan tenaga kerja



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

berkompeten. Dengan fokus pada inovasi dan teknologi, sektor industri diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merata dan adil.

Kementerian Perindustrian mengacu pada sembilan misi Presiden yang meliputi peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, pembangunan yang merata, lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya, penegakan hukum, perlindungan bagi masyarakat, pemerintahan yang bersih, serta sinergi dengan pemerintah daerah. Misi ini menjadi panduan strategis bagi pembangunan sektor industri untuk lima tahun ke depan.

Tujuan utama pembangunan sektor industri adalah meningkatkan peran industri dalam perekonomian nasional, yang dipantau melalui indikator kinerja seperti pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas, kontribusi sektor industri terhadap PDB, jumlah tenaga kerja di sektor industri, serta nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas. Untuk mendukung pencapaian ini, Kementerian Perindustrian menetapkan enam kebijakan strategis: pengembangan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayah, pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta reformasi birokrasi.

Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian berkomitmen memperkuat daya saing industri nasional, meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

• Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa RTRW merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar Wilayah, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi.

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, pada pasal 6, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi:

- a. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;
- b. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
- c. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-



- hasil olahan laut yang besar; dan
- d. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman utama dalam penataan ruang. RTRW bertujuan untuk mewujudkan wilayah kepulauan yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis agromarinawisata, minyak dan gas, serta industri ramah lingkungan. Sebagai acuan, RTRW berfungsi untuk menyusun RDTR, perencanaan pembangunan jangka panjang, dan jangka menengah, serta menjadi dasar dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pengembangan tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan hierarki Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pengembangan sistem infrastruktur wilayah dilakukan secara terintegrasi, meliputi jaringan transportasi laut, darat dan udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta fasilitas pendukung lainnya, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam pembangunan, dengan fokus pada perlindungan kawasan lindung seperti hutan, daerah resapan air, dan ruang terbuka hijau. Upaya ini diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak melampaui daya dukung lingkungan serta pengembangan infrastruktur mitigasi bencana. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk melalui



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

optimalisasi kawasan pesisir dan pulau kecil berbasis ekosistem, pengembangan energi terbarukan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.

Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Sektor kelautan, agribisnis, pariwisata, dan industri kecil menengah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan daya saing lokal. Selain itu, kawasan strategis, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun lingkungan, akan dikembangkan secara optimal, dengan tetap mempertahankan keseimbangan fungsi pertahanan, keamanan, dan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.

Rencana pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang sangat penting untuk menjamin keberhasilan program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan mampu menjadi wilayah yang berdaya saing tinggi, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan RTRW tahun 2023–2043.

Selanjutnya, keterkaitan antar RTRW dan rencana pembangunan jangka menengah daerah diejawantahkan kedalam lingkup tugas dan fungsi DKUMPP.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan UM di Kabupaten Kepulauan Anambas perlu memanfaatkan potensi kawasan agromarinawisata yang telah diidentifikasi dalam RTRW 2023–2043. Kawasan ini mencakup sektor perikanan, perkebunan, dan hortikultura, yang memberikan peluang bagi pelaku



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

koperasi dan usaha kecil untuk mengembangkan produk lokal dengan nilai tambah. Pengelolaan kawasan budidaya pesisir juga menjadi salah satu strategi utama yang dapat memperkuat daya saing usaha kecil, seiring dengan pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung promosi produk secara daring.

Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan memegang peran penting dalam optimalisasi fungsi kawasan permukiman perkotaan, terutama sebagai pusat perdagangan lokal. Sesuai RTRW, pengembangan pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) seperti Tarempa dapat difokuskan untuk mendorong integrasi pasar lokal dan global. Infrastruktur transportasi yang terhubung, termasuk jaringan pelabuhan pengumpul dan terminal barang, akan meningkatkan efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok dan mendukung stabilitas harga.

Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian di Kabupaten Kepulauan Anambas perlu memprioritaskan pengembangan kawasan peruntukan industri sesuai RTRW, dengan fokus pada sektor minyak, gas, dan industri pariwisata. Selain itu, kawasan industri kecil dapat dikelola secara strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal, terutama yang berbasis sumber daya bahari. Dukungan infrastruktur energi, seperti pembangkit listrik tenaga diesel dan mikrohidro, menjadi aspek penting dalam memastikan kelangsungan operasional industri di wilayah ini.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru melalui optimalisasi kawasan industri kecil menengah (IKM) dan pusat kegiatan lokal (PKL) sebagaimana diatur dalam RTRW. Pengembangan keterampilan tenaga kerja difokuskan pada sektor-sektor potensial seperti



perikanan, pertanian, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal untuk mendukung daya saing tenaga kerja daerah. Selain itu, pelatihan berbasis kebutuhan wilayah dan akses ke infrastruktur pendukung, seperti transportasi dan layanan publik, menjadi prioritas untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan memperkuat perekonomian lokal secara berkelanjutan.

- **Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029 merupakan instrumen penting dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan program daerah. KLHS ini bertujuan untuk memastikan peningkatan kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan sosial,



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

kualitas lingkungan hidup, keadilan, dan tata kelola yang baik demi menjaga kualitas hidup lintas generasi. Analisis KLHS juga mencakup daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menjadi fondasi utama dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan kapasitas alam dan masyarakat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi rendah dalam penyediaan pangan, tantangan dalam pengelolaan air bersih, dan daya tampung limbah yang terbatas, sehingga memerlukan solusi inovatif untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

KLHS mengidentifikasi delapan isu strategis utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan ke depan. Isu-isu tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta penguatan ketahanan pangan dan energi. Selain itu, pengelolaan potensi sumber daya maritim yang optimal, peningkatan kualitas lingkungan hidup, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi prioritas untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Rekomendasi yang diberikan KLHS merupakan kebijakan prioritas seperti peningkatan infrastruktur layanan dasar, khususnya penyediaan air bersih, sanitasi, dan pendidikan berkualitas yang merata. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup difokuskan pada optimalisasi pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular dan rehabilitasi ekosistem untuk menjaga daya dukung lingkungan. KLHS juga menekankan pentingnya membangun resiliensi daerah terhadap bencana dengan menggunakan pendekatan teknologi mitigasi dan infrastruktur hijau, yang menjadi kunci dalam menghadapi perubahan iklim.



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kabupaten Kepulauan Anambas juga diarahkan untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelautan atau *blue economy*, dengan pariwisata sebagai salah satu motor penggerak utama. Namun, pembangunan ini harus diiringi langkah mitigasi untuk mencegah degradasi lingkungan. KLHS juga memberikan peta kerentanan wilayah untuk mengidentifikasi risiko bencana seperti angin puting beliung, gelombang pasang, banjir, longsor, dan kebakaran hutan, sehingga langkah mitigasi dapat dirancang dengan baik.

Sebagai upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), KLHS berkontribusi pada pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Analisis capaian indikator menunjukkan bahwa beberapa indikator telah tercapai, sementara lainnya memerlukan intervensi tambahan untuk memastikan keberhasilan implementasi. KLHS juga menyarankan skenario pembangunan, baik optimis dengan intervensi tambahan pada semua sektor, maupun mitigasi dengan fokus pada adaptasi dan pengurangan dampak lingkungan. Dengan demikian, KLHS menjadi panduan strategis untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas berorientasi pada keberlanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu dipastikan tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Rincian muatan KLHS dan hubungannya terhadap Renstra DKUMPP adalah sebagai berikut:



Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di DKUMPP berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Program yang difokuskan mencakup pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, modernisasi koperasi, serta penguatan kelembagaan usaha kecil agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Melalui pengembangan sektor ekonomi biru (blue economy), bidang ini juga mendorong diversifikasi usaha berbasis potensi lokal seperti kelautan dan perikanan untuk memperluas peluang pendapatan masyarakat.

Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mendukung keberlanjutan ekonomi dengan memastikan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Fokus utamanya adalah pada pengembangan jaringan pasar yang berbasis teknologi digital, seperti marketplace lokal, untuk mempromosikan produk unggulan daerah. Selain itu, bidang ini bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan infrastruktur logistik seperti pelabuhan dan gudang untuk mendukung efisiensi distribusi barang ke kawasan terpencil..

Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian di DKUMPP memprioritaskan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal yang ramah lingkungan. Strategi yang diusung meliputi pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) melalui pelatihan teknologi produksi yang efisien, serta promosi produk lokal untuk memasuki pasar global. Pembangunan sentra industri juga diarahkan untuk mendukung pengolahan hasil perikanan dan agrikultur yang sesuai dengan standar keberlanjutan.



Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan dalam meningkatkan kualitas angkatan kerja lokal melalui program pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Fokus utama adalah menciptakan tenaga kerja yang kompeten di sektor maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas. Bidang ini juga memfasilitasi kerja sama dengan sektor swasta untuk memperluas kesempatan kerja bagi penduduk lokal.

5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tanggung jawab dalam mendorong pengelolaan sektor ekonomi lokal yang efektif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan tugas mengelola pengembangan koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian, DKUMPP diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul, termasuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal, membangun infrastruktur yang memadai, dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah secara efisien.

DKUMPP memainkan peran strategis dalam menyelaraskan kebijakan ekonomi dengan kebutuhan pembangunan daerah, yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Dalam menghadapi dinamika pembangunan, berbagai isu strategis harus diidentifikasi untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang mampu mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang secara optimal. Berikut adalah isu-isu strategis yang dihadapi DKUMPP:



Tabel 2. 8 Menyimpulkan Isu Strategis

No	Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD	Bidang
				Global	Nasional	Regional		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Banyaknya produk unggulan daerah yang mempunyai ciri khas tersendiri, seperti kerupuk ikan, cumi, sagu, kerajinan tangan dan produk hasil perikanan lainnya, serta pengrajin batik dan tenun khas kepulauan Anambas	Pemasaran produk yang kurang optimal, sehingga peminat pembuat produk asli khas lokal menjadi tidak bergairah karena ketidakpastian permintaan	Pembangunan ekonomi berkelanjutan	masih kurangnya akses pasar produk daerah untuk dieksport ke pasar global dikarenakan aturan yang rumit	rendahnya literasi digital dan teknologi dalam pemasaran produk daerah	kondisi geografis kepulauan Anambas yang sulit dijangkau mengakibatkan pasar regional tidak terlalu melirik produk daerah Anambas	Peningkatan daya saing produk lokal berbasis ekonomi biru	Bidang koperasi, dan usaha mikro, dan Bidang Industri
		Hilirisasi pengembangan UMKM dan IKM masih belum dilakukan dengan optimal, sehingga belum mencapai nilai tambah yang signifikan dan kompetitif		persaingan produk global semakin ketat, terutama barang dari China	keterbatasan alat produksi untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah	Tantangan persaingan dengan produk-produk regional yang lebih kompetitif dari segi harga		



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD	Bidang
				Global	Nasional	Regional		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Masih rendahnya diversifikasi produk industri manufaktur						
		Rendahnya produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan oleh industri kecil						
		Minimnya sentra industri dikarenakan peralatan dan pengelolaanya belum optimal						
2	Pengembangan jalur distribusi perdagangan dalam dan luar daerah	Ketersediaan sarana distribusi yang belum merata						
		belum optimalnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan terutama tempat penyimpanan barang						
		rantai distribusi pasokan kebutuhan pokok belum terpetakan dengan jelas						
		Pembangunan ekonomi berkelanjutan		teknologi distribusi global yang semakin berkembang cepat	rentang kendali daerah ke pusat yang jauh	rentang kendali daerah ke provinsi yang jauh	Peningkatan pengelolaan infrastruktur perdagangan	Bidang Perdagangan



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD	Bidang
				Global	Nasional	Regional		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Potensi koperasi dan umkm dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal	kurangnya komitmen anggota dalam pengelola koperasi		Persaingan koperasi kecil dengan perusahaan multinasional yang bergerak dalam sektor pembiayaan	Kurangnya dukungan pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan koperasi	Keterbatasan SDM pengelola koperasi dalam mengelola sistem perkoperasian yang inovatif, dan modern	Peningkatan koperasi yang berkualitas dan inovatif dalam tata kelola	Bidang koperasi, dan usaha mikro
		Banyak pengurus koperasi yang belum memahami tata kelola organisasi secara profesional, termasuk manajemen keuangan dan strategi pemasaran. Hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran anggota koperasi untuk melaksanakan kewajiban mereka, seperti pembayaran iuran dan keterlibatan aktif dalam kegiatan koperasi						



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD	Bidang
				Global	Nasional	Regional		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Bonus demografi	Pelaku usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pendanaan dari lembaga keuangan. Rendahnya literasi keuangan dan kurangnya jaminan yang dimiliki menjadi kendala utama dalam mendapatkan kredit atau pinjaman usaha					Pengembangan kapasitas SDM pelaku ekonomi lokal dan inovasi dalam akses pembiayaan	
		Masih rendahnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja		Persaingan tenaga kerja semakin kompetitif			Pengembangan kapasitas pencari kerja	Bidang tenaga kerja dan transmigrasi
		Rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan		dunia global sekarang lebih mengandalkan pekerja dari A.I (artificial intelligence) dibanding manusia	semakin tingginya tenaga kerja sektor informal	semakin tingginya tenaga kerja sektor informal		



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD	Bidang
				Global	Nasional	Regional		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja		semakin tingginya tenaga kerja sektor informal			Perlunya perlindungan sosial ketenagakerjaan	
		Banyaknya pekerja sektor informal seperti petani, nelayan dan buruh harian lepas						
		Ketidakjelasan aset program transmigrasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat						



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) berperan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah melalui pengelolaan koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan sektor perindustrian. Peran ini mencakup penguatan kelembagaan koperasi, pemberdayaan pelaku usaha mikro, pengembangan industri kecil dan menengah, serta peningkatan perdagangan yang mendukung prioritas pembangunan seperti penguatan daya saing ekonomi, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, dan pemerataan pembangunan. DKUMPP menjadi elemen penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Keberhasilan pelaksanaan peran DKUMPP memerlukan perumusan tujuan dan sasaran yang terarah serta relevan dengan visi pembangunan daerah. Tujuan memberikan panduan strategis untuk pengembangan sektor ekonomi lokal, sementara sasaran menetapkan langkah-langkah konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang terstruktur, setiap bidang dalam DKUMPP dapat berfungsi secara sinergis untuk mendukung prioritas pembangunan, memastikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, memperkuat koordinasi antarunit, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ekonomi.

Indikator kinerja yang spesifik, terukur, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART) menjadi komponen penting untuk mengukur keberhasilan program-program DKUMPP. Indikator ini tidak hanya berfungsi untuk memantau kinerja program, tetapi juga memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan mampu mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan pendekatan yang terarah, DKUMPP dapat memainkan



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

peran yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung peran strategis ini, DKUMPP menyusun tujuan dan sasaran jangka menengah yang disertai dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, dari 2025 hingga 2029. Tujuan ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mendukung program-program prioritas yang berdampak nyata bagi pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.



Tabel 3.1 (Tabel T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MISI 3: Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif SASARAN: Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel (TUJUAN I)	Nilai SAKIP (predikat) (INDIKATOR TUJUAN I)	B	B	B	B	BB	BB	Predikat evaluasi SAKIP perangkat daerah	Kondisi akhir adalah BB (predikat)	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas (SASARAN I DARI TUJUAN I)	Nilai SAKIP (angka) (INDIKATOR SASARAN I DARI SASARAN I DAN TUJUAN I)	67,3	67,5	68	68,72	70,46	71,86	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	Kondisi akhir adalah 71,86 (angka)	
MISI 4: Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata SASARAN: Meningkatkanya kontribusi sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata (TUJUAN II)	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (persen) (INDIKATOR TUJUAN II)	0,17	0,18	0,2	0,21	0,22	0,24	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB Industri Pengolahan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Kondisi akhir adalah 0,24 (persen)	
	Meningkatnya daya saing pelaku IKM, UMKM dan koperasi yang bergerak pada sektor maritim dan pariwisata (%) (INDIKATOR SASARAN I DARI SASARAN I DAN TUJUAN II)	Persentase pertumbuhan pelaku IKM dan UMKM yang bergerak pada sektor maritim dan pariwisata (%) (INDIKATOR SASARAN I DARI SASARAN I DAN TUJUAN II)	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	$\frac{\text{Jumlah pelaku IKM dan UMKM pada tahun } n - \text{jumlah pelaku IKM dan UMKM pada tahun } (n-1)}{\text{jumlah pelaku IKM dan UMKM pada tahun } (n-1)} \times 100\%$	Kondisi akhir adalah 2 persen	
		Nilai ekspor perdagangan produk unggulan daerah berbasis maritim dan pariwisata (US \$) (INDIKATOR SASARAN II DARI SASARAN I DAN TUJUAN II)	1.125.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000	Nilai ekspor komoditi sektor maritim dan pariwisata	Kondisi akhir US \$ 1.250.000	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MISI 5: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan SASARAN : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran terbuka	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan pengangguran daerah (TUJUAN III)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (INDIKATOR TUJUAN III)		2,19	2,16	2,13	2,09	2,06	2,02	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Kondisi akhir adalah 2,02 persen
	Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja (INDIKATOR SASARAN I DARI SASARAN I DAN TUJUAN III)	Rasio penduduk yang bekerja (INDIKATOR SASARAN I DARI SASARAN I DAN TUJUAN III)		97,81	97,84	97,87	97,91	97,94	97,98	$\frac{\text{Penduduk yang Bekerja}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Kondisi akhir adalah 97,98 persen



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tanggung jawab strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan periode 2025-2029, diperlukan perumusan strategi dan kebijakan yang terencana dengan baik. Strategi ini dirancang untuk mengarahkan pelaksanaan program di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian agar mampu mendukung pencapaian sasaran secara terukur dan efektif, sementara kebijakan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Strategi yang dirancang DKUMPP tidak hanya berfokus pada optimalisasi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan kecil, tetapi juga pada pengembangan perdagangan dan industri yang berorientasi pada keberlanjutan. Tujuan ini mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan jaringan distribusi perdagangan, dan modernisasi sektor industri kecil. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah operasional tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan kebijakan DKUMPP dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan memastikan bahwa target seperti peningkatan daya saing produk lokal, perluasan akses pasar, serta integrasi teknologi digital dalam pengelolaan usaha dapat dicapai secara optimal. Dengan pendekatan yang terintegrasi, kebijakan ini memberikan dasar untuk inovasi dalam pengembangan ekonomi, kolaborasi lintas sektor, dan evaluasi berkelanjutan guna memastikan program-program yang dirancang tetap



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan yang ada.

Strategi dan kebijakan ini juga menjadi landasan untuk mendorong keberlanjutan ekonomi melalui diversifikasi usaha berbasis sumber daya lokal, seperti kelautan, perikanan, dan agribisnis. Melalui inovasi dan kolaborasi, DKUMPP dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan strategi dan kebijakan ini akan memastikan bahwa DKUMPP tetap berada di jalur yang benar dalam mendukung prioritas pembangunan daerah hingga tahun 2029.

Berikut adalah tabel yang memuat penahapan strategi, dan arah kebijakan Renstra yang telah disusun untuk jangka waktu 2025 hingga 2029:



Tabel 3. 2 Penahapan Strategi Renstra PD

No	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatan sistem dan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai unsur	Peningkatan mekanisme pengendalian kegiatan	Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2	Peningkatan daya saing produk lokal berbasis ekonomi biru	Penguatan dan melanjutkan peningkatan daya saing produk lokal	Pemantapan produk lokal dengan lebih meningkatkan nilai tambah produk dan menumbuhkan umkm dan ikm	Pengembangan dan pemantapan produk lokal yang lebih berkualitas dan beranekaragam dari tahun sebelumnya	Penguatan merk dagang produk lokal



No	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5	6
3	Pengembangan kapasitas SDM pelaku ekonomi lokal dan inovasi dalam akses pembiayaan	Peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi lokal dan inovasi dalam akses pembiayaan	Pemantapan kapasitas SDM pelaku ekonomi lokal dan inovasi dalam akses pembiayaan	Pemantapan kapasitas SDM pelaku ekonomi lokal dan inovasi dalam akses pembiayaan	Pemantapan kapasitas SDM pelaku ekonomi lokal dan inovasi dalam akses pembiayaan
4	Meningkatkan jumlah koperasi dan kualitas koperasi	Meningkatkan kualitas koperasi dan pelatihan SDM koperasi dalam tata kelola	Pemantapan kualitas koperasi dan pelatihan SDM koperasi dalam tata kelola	Pemantapan kualitas koperasi dan pelatihan SDM koperasi dalam tata kelola	Pemantapan kualitas koperasi dan pelatihan SDM koperasi dalam tata kelola
5	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling	Penciptaan lapangan kerja berkualitas dengan upah di atas standar hidup layak	Peningkatan akses dan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Penumbuhan kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan, fasilitasi akses terhadap Modal, dan insentif pajak untuk memulai bisnis	Pemantapan link and macth dalam memastikan lulusan dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5	6
					lapangan kerja dan dunia usaha yang berkembang
6	Melakukan monitoring terhadap kawasan transmigrasi	Melakukan monitoring terhadap kawasan transmigrasi	Melakukan reviu terhadap kawasan transmigrasi yang telah ada	Pemantapan kawasan transmigrasi	Penetapan kawasan transmigrasi
7	Memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan	Memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan	Memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan	Memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan	Memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan



Tabel 3. 3 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, ramah dan cepat	Meningkatkan efisiensi dalam perencanaan dan penganggaran	
2	Meningkatkanya kontribusi sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata	Mengembangkan UMKM yang profesional, produktif, dan berdaya saing	Peningkatan SDM koperasi & umkm dan fasilitasi UMKM untuk bermitra dan Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique and high-value economy), diantaranya melalui peningkatan hilirisasi komoditas unggulan daerah oleh IKM, koperasi, dan UMKM	



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran terbuka	Meningkatkan kesempatan dan partisipasi kerja bagi masyarakat disertai peningkatan kapasitas dalam menghadapi perkembangan lapangan usaha	Meningkatkan kesempatan dan partisipasi kerja bagi masyarakat disertai peningkatan kapasitas dalam menghadapi perkembangan lapangan usaha	
		Memberikan perlindungan sosial kepada nelayan, petani, dan buruh lepas	Pemberian BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk pekerja sektor informal	



Tabel 3. 4 (T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Misi RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MISI 3: Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Meningkatkan efisiensi dalam perencanaan dan penganggaran	Peningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatan sistem dan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai unsur	Peningkatan mekanisme pengendalian kegiatan	Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
MISI 4: Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata	Meningkatkan daya saing pelaku IKM, UMKM dan koperasi yang bergerak pada sektor maritim dan pariwisata	Peningkatan SDM koperasi & umkm dan fasilitasi UMKM untuk bermitra dan Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi	Peningkatan daya saing produk lokal berbasis ekonomi biru	Penguan dan melanjutkan peningkatan daya saing produk lokal	Pemantapan produk lokal dengan lebih meningkatkan nilai tambah produk dan menumbuhkan umkm dan ikm	Pengembangan dan pemantapan produk lokal yang lebih berkualitas dan beranekaragam dari tahun sebelumnya	Penguan merk dagang produk lokal



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Misi RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(unique and high-value economy), diantaranya melalui peningkatan hilirisasi komoditas unggulan daerah oleh IKM, koperasi, dan UMKM					
			Pengembangan kapasitas SDM pelaku ekonomi lokal dan inovasi dalam akses pembiayaan	Peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi lokal dan inovasi dalam akses pembiayaan	Pemantapan kapasitas SDM pelaku ekonomi lokal dan inovasi dalam akses pembiayaan	Pemantapan kapasitas SDM pelaku ekonomi lokal dan inovasi dalam akses pembiayaan	Pemantapan kapasitas SDM pelaku ekonomi lokal dan inovasi dalam akses pembiayaan	Pemantapan kapasitas SDM pelaku ekonomi lokal dan inovasi dalam akses pembiayaan



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Misi RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatkan jumlah koperasi dan kualitas koperasi	Meningkatkan kualitas koperasi dan pelatihan SDM koperasi dalam tata kelola	Pemantapan kualitas koperasi dan pelatihan SDM koperasi dalam tata kelola	Pemantapan kualitas koperasi dan pelatihan SDM koperasi dalam tata kelola	Pemantapan kualitas koperasi dan pelatihan SDM koperasi dalam tata kelola
MISI 5: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan pengangguran daerah	Meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja	Meningkatkan kesempatan dan partisipasi kerja bagi masyarakat disertai peningkatan kapasitas dalam menghadapi perkembangan lapangan usaha	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling	Penciptaan lapangan kerja berkualitas dengan upah di atas standar hidup layak	Peningkatan akses dan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Pembuahan kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan, fasilitasi akses terhadap Modal, dan insentif pajak untuk memulai bisnis	Pemantapan link and macth dalam memastikan lulusan dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja dan dunia



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Misi RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Melakukan monitoring terhadap kawasan transmigrasi	Melakukan monitoring terhadap kawasan transmigrasi	Melakukan review terhadap kawasan transmigrasi yang telah ada	Pemantapan kawasan transmigrasi	usaha yang berkembang
			Pemberian BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk pekerja sektor informal	Memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan	Memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan	Memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan	Memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan	Memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) merumuskan sejumlah program strategis yang menjadi fokus pelaksanaan selama periode 2025–2029. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dan isu strategis yang telah diidentifikasi, seperti penguatan daya saing koperasi dan usaha mikro dan kecil, pengembangan perdagangan yang efisien, diversifikasi industri lokal, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja. Program ini juga bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara terintegrasi sesuai RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Program DKUMPP disusun berdasarkan tugas dan fungsi dinas ini dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025–2029. Program-program tersebut mencakup indikator keluaran (outcome) yang dirancang untuk memastikan setiap kegiatan mencerminkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan misi DKUMPP. Kegiatan yang dirancang tidak hanya mendukung pelaksanaan strategi dan kebijakan jangka menengah, tetapi juga menargetkan solusi atas berbagai permasalahan pembangunan daerah. Indikator keluaran program difokuskan pada manfaat langsung bagi kelompok sasaran, seperti peningkatan kapasitas pelaku usaha, stabilitas harga barang pokok, efisiensi distribusi perdagangan, dan pertumbuhan industri kecil menengah.



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Program-program strategis ini meliputi beberapa aspek utama, seperti pemberdayaan koperasi, penguatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil, pengembangan pasar dan distribusi perdagangan yang lebih efisien, serta pengelolaan sentra industri yang inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, program pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui pelaksanaan program ini, DKUMPP bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, efisien, dan berdaya saing, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pelaksanaan program-program ini juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan program-program DKUMPP mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, mendorong pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berikut adalah daftar program- program yang akan dilaksanakan oleh DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini dirancang untuk memastikan koperasi menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip koperasi dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan meliputi evaluasi terhadap tata kelola, laporan keuangan, serta kepatuhan koperasi dalam memberikan manfaat kepada anggotanya, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap koperasi.

2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Program ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan operasional Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). Penilaian dilakukan untuk memastikan kesehatan koperasi dalam hal likuiditas, solvabilitas, dan tata kelola, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan koperasi dalam memberikan layanan kepada anggotanya.

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pendidikan dan pelatihan. Materi pelatihan mencakup pengelolaan koperasi, manajemen keuangan, hingga strategi pemasaran, sehingga pengurus dan anggota koperasi dapat menjalankan organisasi mereka dengan lebih profesional dan efektif.

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini bertujuan untuk memperkuat koperasi melalui berbagai bentuk pemberdayaan, seperti fasilitasi akses pembiayaan, pendampingan teknis, dan perlindungan hukum. Selain itu, program ini juga berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi koperasi untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini mendukung pertumbuhan UMKM melalui akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan teknis. Fokus utamanya adalah meningkatkan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

6. Program Pengembangan UMKM



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Program ini berorientasi pada peningkatan kapasitas UMKM melalui inovasi produk, diversifikasi usaha, dan promosi ke pasar yang lebih luas. Selain itu, program ini juga mendorong integrasi teknologi dalam proses produksi dan pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasar UMKM.

7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur distribusi perdagangan, seperti pasar, gudang, dan fasilitas transportasi. Dengan distribusi yang lebih efisien, program ini mendukung kelancaran perdagangan serta stabilitas harga barang di tingkat lokal maupun regional.

8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini fokus pada pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui pengawasan distribusi dan stok. Dengan menjaga stabilitas harga, program ini memastikan ketersediaan barang yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan ekonomi daerah.

9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini bertujuan untuk menyiapkan surat izin penggunaan usaha.

10. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini bertujuan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar kualitas dan keamanan, sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen. Kegiatan meliputi sertifikasi produk, edukasi konsumen, dan pengawasan terhadap praktik usaha yang merugikan konsumen.



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

11. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini dirancang untuk mendukung pengembangan industri berbasis sumber daya lokal melalui perencanaan yang strategis. Program ini mencakup pengembangan kawasan industri, modernisasi teknologi, dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri lokal.

12. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini berfokus pada pengelolaan data dan informasi terkait industri di tingkat daerah sebagai bagian dari Sistem Informasi Industri Nasional. Dengan integrasi data yang baik, program ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk pengembangan sektor industri secara efisien dan terukur.

13. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan di bidang produktivitas. Program ini mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja, serta penggunaan alat, teknik, dan metode untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

14. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program penempatan tenaga kerja adalah upaya untuk membantu pencari kerja menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan pasar kerja. Ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penyebarluasan informasi lowongan kerja, pelatihan keterampilan, dan bantuan perantaraan kerja.

15. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial adalah serangkaian aktivitas dan inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

harmonis dan produktif antara pengusaha dan pekerja, baik di tingkat nasional, regional, maupun perusahaan. Program ini juga fokus pada urusan sosial dan ekonomi, seperti penetapan upah, waktu kerja, dan kondisi kerja.

16. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini bertujuan untuk menetapkan kawasan transmigrasi agar kesejahteraan masyarakat transmigran meningkat.

17. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk melayani kegiatan operasional seperti administrasi umum, administrasi keuangan hingga pengelolaan aset urusan penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Rencana belanja program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Sebelum dilakukan penyusunan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan, maka hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dengan cascade, adapun hasil cascading dapat dilihat pada tabel 4.1, setelah hasil tabel 4.1 didapatkan, maka selanjutnya adalah penentuan pendanaan pagu indikatifnya yaitu dapat dilihat pada tabel 4.2. selain pagu rencana belanja program, DKUMPP juga memploting rencana pembiayaan berupa pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat sebesar Rp. 500.000.000 hingga Rp.2.000.000.000 setiap tahunnya, tergantung kemampuan keuangan daerah dan kesiapan BLUD yang nantinya akan dikelola.



Tabel 4. 1 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			KETERANGAN
						1	2	3	
MISI 3: Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif SASARAN: Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel (TUJUAN I)				Nilai SAKIP (predikat) (INDIKATOR TUJUAN I)				
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas (SASARAN I DARI TUJUAN I)			Nilai SAKIP (angka) (INDIKATOR SASARAN I DARI SASARAN I DAN TUJUAN I)				
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah		Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Sekretariat)
					Indeks kepuasan masyarakat				
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja perangkat daerah secara tepat waktu, akurat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7			8
								Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
								Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan dalam mendukung manajemen ASN di lingkungan perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8
				Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang mencakup penyediaan bahan perkantoran, pelaksanaan rapat, aktivitas lapangan, pelayanan tamu, perjalanan dinas, dan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							Pengadaan Mebel	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8
				Tersedianya layanan jasa administrasi perkantoran dan langganan operasional yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah agar tetap berfungsi dan dalam kondisi baik untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
MISI 4: Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata SASARAN: Meningkatkannya kontribusi sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata (TUJUAN II)	Meningkatkan kontribusi sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata (TUJUAN II)				Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (persen) (INDIKATOR TUJUAN II)			



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7			8
		Meningkatnya daya saing pelaku IKM, UMKM dan koperasi yang bergerak pada sektor maritim dan pariwisata (SASARAN I DARI TUJUAN II)			Persentase pertumbuhan pelaku IKM dan UMKM yang bergerak pada sektor maritim dan pariwisata (%) (INDIKATOR SASARAN I DARI SASARAN I DAN TUJUAN II)				
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)
				Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi, koperasi simpan pinjam, dan unit simpan pinjam koperasi di wilayah kabupaten/kota untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan terjaganya kesehatan kelembagaan koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
									Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase koperasi aktif	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7			8
				Meningkatnya kualitas tata kelola koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi melalui pelaksanaan penilaian kesehatan secara sistematis dan berkelanjutan di wilayah kabupaten/kota.	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
							Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan		
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)
				Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
							Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7			8
				Meningkatnya kemandirian dan ketahanan koperasi melalui program pemberdayaan dan perlindungan koperasi di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
							Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Pertumbuhan wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)
					Proporsi Jumlah UMKM Non Pertanian pada Level Kabupaten				
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	jumlah usaha mikro yang diberdayakan		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
							Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik		
							Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		
			Meningkatnya daya saing UMKM		Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7			8
			Meningkatnya jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil melalui program pengembangan usaha secara terarah dan berkelanjutan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
								Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
								Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Pertumbuhan wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			UPT Pengelolaan Dana Bergulir	
				Proporsi Jumlah UMKM Non Pertanian pada Level Kabupaten					
			Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan strategis, fasilitasi perizinan, dan penguatan kelembagaan secara terkoordinasi di tingkat daerah	jumlah usaha mikro yang diberdayakan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
						Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			
						Pemulihan Usaha Mikro			
		Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah		Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			UPT Pengelolaan Dana Bergulir	
			Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada sektor koperasi dan UMKM	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD				



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			KETERANGAN
						1	2	3	
								Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
		Meningkatnya daya saing pelaku IKM, UMKM dan koperasi yang bergerak pada sektor maritim dan pariwisata (SASARAN I DARI TUJUAN II)			Nilai ekspor perdagangan produk unggulan daerah berbasis maritim dan pariwisata (US \$) (INDIKATOR SASARAN II DARI SASARAN I DAN TUJUAN II)				
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Perdagangan)
				Tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting secara stabil, merata, dan terjangkau di tingkat daerah guna mendukung ketahanan ekonomi masyarakat	Jumlah Ketersediaan Bapokting (Hari)		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah		
								Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Terkendalinya harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar kabupaten/kota guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
								Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7			8
				Meningkatnya efektivitas pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi dalam rangka menjamin ketersediaan dan ketepatan distribusi bagi petani di wilayah kabupaten/kota	Persentase realisasi pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
							Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		
			meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Perdagangan)
				Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola secara optimal untuk mendukung kelancaran arus barang, pemerataan distribusi, dan peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha di daerah	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dikelola		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
							Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase penanganan pengaduan konsumen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			UPT Metrologi Legal
				Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan metrologi legal terhadap UTTP guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen di bidang perdagangan	Persentase alat-alat ukur, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
							Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7			8
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Perdagangan)
				Terbitnya dokumen perizinan pengelolaan dan operasional pasar rakyat, pusat perbelanjaan, serta toko swalayan sebagai bentuk fasilitasi pemerintah daerah dalam mendukung iklim usaha yang kondusif	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			
									Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Industri)
				Tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan dilaksanakannya evaluasi berkala untuk menjamin keselarasan program dengan kebutuhan dan potensi daerah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Level Kabupaten	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
					Persentase Penyusunan dan evaluasi pembangunan industri				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7			8
						Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota			
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri			Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Industri)
				Tersedianya data dan informasi industri yang akurat dan terkini untuk mendukung proses penerbitan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKIdanIPKIKewenanganKabupaten/Kota			
							Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)		
MISI 5: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan SASARAN : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan menurunkan pengangguran daerah (TUJUAN III)	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan pengangguran daerah (TUJUAN III)				Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (INDIKATOR TUJUAN III)				
		Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja (SASARAN I DARI TUJUAN III)			Rasio penduduk yang bekerja (INDIKATOR SASARAN I DARI SASARAN I DAN TUJUAN III)				



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
				Terlaksananya pelatihan tenaga kerja dengan pendekatan berbasis unit kompetensi sebagai upaya peningkatan kualitas SDM yang tersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
							Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
							Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
				Terlaksananya pelayanan antar kerja bagi pencari kerja dan pengguna tenaga kerja di wilayah Kabupaten/Kota untuk mempertemukan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja secara efektif	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
							Pelayanan antar Kerja
			Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Tenaga



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		Kerja dan Transmigrasi)
				Terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama bagi perusahaan yang beroperasi dalam satu wilayah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	persentase peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama yang disahkan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
						Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
						Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
						Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
				Terlaksananya upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah Kabupaten/Kota secara tepat, adil, dan sesuai peraturan perundang-undangan	persentase Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota yang dicegah dan diselesaikan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	
						Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
						Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			KETERANGAN
						1	2	3	
								Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	
								Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi		Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
				Terlaksananya penataan persebaran penduduk dari dalam wilayah Kabupaten/Kota guna mendukung pemerataan pembangunan dan pengendalian kepadatan penduduk	Persentase persebaran penduduk yang ditata		Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota		
								Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	



Tabel 4. 2 (Tabel T-C.27) Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN KONDISI AKHIR TARGET	KETERANGA N LAINNYA		
				2026		2027		2028		2029		2030							
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.427.017.773		7.501.287.951		7.576.300.830		7.652.063.838		7.728.584.474				PROGRAM PRIORITAS		
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah (OUTCOME)	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	[Akumulasi capaian tiap kegiatan/ jumlah total kegiatan (8)]*100%	93	100		100		100		100		100		Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100%					
	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	92,8	93,2		93,5		93,8		94,0		94,2		Kondisi akhir s.d 2030 adalah 94,2%					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	100	19.575.000	100	21.532.500	100	23.685.750	100	26.054.326	100	28.659.757	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100%					
	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja perangkat daerah secara tepat waktu, akurat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (OUTPUT)	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja yang dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan dibagi dokumen laporan kinerja dan hasil pengendalian evaluasi yang disusun*100% kinerja yang seharusnya tepat waktu*100 %																
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah tahapan yang sesuai dibagi jumlah seluruh tahapan*100% (Form E.68 Permendagri 86/2017-Renstra & Form E.70 Permendagri 86/2017-Renja)	5	5	10.575.000	5	11.632.500	5	12.795.750	5	14.075.326	5	15.482.857	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 25 dokumen				
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA/DPPA	2	2	4.350.000	2	4.850.000	2	5.400.000	2	6.005.000	2	6.670.500	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 10 dokumen				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah	1	1	4.000.000	1	4.400.000	1	4.840.000	1	5.324.000	1	5.856.400	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 5 laporan				
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen validata pendukung statistik sektoral daerah	-	1	350.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 5 dokumen				
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data validata yang dikumpulkan	-	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 5 data				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	100	6.319.362.468	100	6.380.341.045	100	6.441.972.902	100	6.504.268.923	100	6.567.240.533	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100%				



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2026		2027		2028		2029		2030		KETERANGAN KONDISI AKHIR TARGET	KETERANGA N LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (OUTPUT)	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Dokumen administrasi pengelolaan keuangan													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Amprah gaji dan tunjangan	34	55	6.049.529.668	55	6.110.024.965	55	6.171.125.214	55	6.232.836.466	55	6.295.164.831	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 55 orang/bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen dan laporan kinerja yang dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan dibagi dokumen perencanaan dan laporan kinerja dan hasil pengendalian evaluasi yang disusun*100% kinerja yang seharusnya tepat waktu*100%	1	1	265.000.000	1	265.000.000	1	265.000.000	1	265.000.000	1	265.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 5 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	1	1	4.832.800	1	5.316.080	1	5.847.688	1	6.432.457	1	7.075.702	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 5 laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			90	100	55.000.000	100	63.700.000	100	-	100	55.000.000	100	28.700.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100%	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan dalam mendukung manajemen ASN di lingkungan perangkat daerah (OUTPUT)	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu/ jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang seharusnya*100%													
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	1	55.000.000	1	35.000.000	-	-	1	55.000.000	-	-	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 3 paket	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	2	28.700.000	-	-	-	-	2	28.700.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 4 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			90	100	474.194.000	100	500.388.401	100	522.510.225	100	586.372.464	100	614.134.710	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100%	



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN KONDISI AKHIR TARGET	KETERANGA N LAINNYA	
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang mencakup penyediaan bahan perkantoran, pelaksanaan rapat, aktivitas lapangan, pelayanan tamu, perjalanan dinas, dan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (OUTPUT)	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Jumlah kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan makanan-minuman, perjalanan dinas, dan pembayaran honor SPBE/ jumlah keseluruhan (8)*100%														
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	7.073.000	3	7.780.301	4	8.558.330	4	9.414.163	5	10.355.579	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 18 paket		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	7	85.421.000	8	93.963.100	10	94.359.410	11	97.695.351	12	98.064.886	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 48 paket		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	5	22.170.000	5	24.387.000	6	26.825.700	7	29.508.270	7	32.459.097	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 30 paket		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	6	32.500.000	7	32.500.000	8	35.750.000	9	39.325.000	10	43.257.500	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 40 paket		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	5	14.750.000	5	14.750.000	5	14.750.000	5	14.750.000	5	14.750.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 25 paket		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	66	9.750.000	66	10.725.000	66	11.797.500	66	12.977.250	66	14.274.975	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 330 dokumen		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	60	302.530.000	65	316.283.000	68	330.469.285	70	382.702.430	72	400.972.673	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 335 laporan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			94	100	147.173.947	100	100.842.412	100	230.200.000	100	111.475.000	100	64.475.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100%		
	Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (OUTPUT)	Percentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan/jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah*100%														
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1	22.445.196	1	49.142.412	1	46.500.000	1	52.700.000	-	-	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 4 unit		



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												
				2026		2027		2028		2029		2030		KETERANGAN KONDISI AKHIR TARGET	KETERANGA N LAINNYA	
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2	50.000.000	-	-	81.200.000	2	46.275.000	2	46.275.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 10 unit		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	6	74.728.751	4	51.700.000	2	12.500.000	2	12.500.000	2	18.200.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 16 unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	90.000.000	-	-	-	-	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 1 unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			90	100	146.754.858	100	142.930.343	100	155.223.378	100	163.668.025	100	169.620.287	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100%	
	Tersedianya layanan jasa administrasi perkantoran dan langganan operasional yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (OUTPUT)	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	Jumlah kebutuhan jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi/ seluruh kebutuhan jasa*100%													
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	25.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 5 laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	2	101.754.858	2	111.930.343	2	123.123.378	2	130.358.025	2	134.979.287	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 10 laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 5 laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			90	100	139.957.500	100	126.553.250	100	37.708.575	100	40.225.100	100	90.754.187	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100%	
	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah agar tetap berfungsi dan dalam kondisi baik untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (OUTPUT)	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik (kendaraan dinas, mebel dan peralatan mesin/2*100%)													
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	14	43.857.500	14	48.243.250	14	23.067.575	14	24.120.000	14	34.211.765	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 70 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	20	12.100.000	20	13.310.000	22	14.641.000	24	16.105.100	27	17.715.610	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 113 unit	



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												
				2026		2027		2028		2029		2030		KETERANGAN KONDISI AKHIR TARGET	KETERANGA N LAINNYA	
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1	84.000.000	1	65.000.000	-	-	-	-	1	38.826.812	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 1 unit		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		90	100	125.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100%		
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada sektor koperasi dan UMKM (OUTPUT)	Percentase peningkatan pelayanan BLUD	{(jumlah pelayanan tahun n - jumlah pelayanan tahun (n-1))/ jumlah pelayanan tahun (n-1)} *100%													
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1	125.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 1 unit kerja	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL,DAN MENENGAH																
PROGRAM PENGAWSAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				13,75	13,79	40.000.000	13,83	42.000.000	13,87	42.000.000	13,91	42.000.000	13,95	42.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 13,95%	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi (OUTCOME)		Percentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	(Jumlah Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa/jumlah total koperasi yang menjadi sasaran pengawasan)*100%													
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			11	11	40.000.000	11	42.000.000	11	42.000.000	11	42.000.000	11	42.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 11 koperasi	
	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi, koperasi simpan pinjam, dan unit simpan pinjam koperasi di wilayah kabupaten/kota untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan terjaganya kesehatan kelembagaan koperasi (OUTPUT)	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan													
	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	11	11	40.000.000	11	42.000.000	11	42.000.000	11	42.000.000	11	42.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 11 unit usaha	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				6,25	6,75	31.307.500	6,79	35.000.000	6,83	35.000.000	6,87	35.000.000	6,91	35.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 6,91%	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi (OUTCOME)		Percentase koperasi aktif	(jumlah koperasi aktif/jumlah total koperasi terdaftar)*100%													



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2026		2027		2028		2029		2030		KETERANGAN KONDISI AKHIR TARGET	KETERANGA N LAINNYA
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5	31.307.500	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 5 koperasi	
	Meningkatnya kualitas tata kelola koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi melalui pelaksanaan penilaian kesehatan secara sistematis dan berkelanjutan di wilayah kabupaten/kota. (OUTPUT)	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan													
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan		5	31.307.500	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 5 unit usaha	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				13	15	42.781.000	18,75	45.000.000	-	-	18,75	50.000.000	-	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 52,5%	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian (OUTCOME)		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan													
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			29	12	42.781.000	15	45.000.000	-	-	15	50.000.000	-		
	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian di tingkat kabupaten/kota (OUTPUT)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian													
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		29	12	42.781.000	15	45.000.000	-	-	15	50.000.000	-	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 42 orang	
PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				1,25	2,5	30.514.000	3,75	61.601.077	-	-	-	-	-	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 6,25%	
Meningkatnya produktivitas koperasi (OUTCOME)		Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas													
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1	2	30.514.000	3	61.601.077	-	-	-	-	-	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 5 unit usaha	
	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan koperasi melalui program pemberdayaan dan perlindungan koperasi di wilayah kabupaten/kota (OUTPUT)	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya													



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												
				2026		2027		2028		2029		2030		KETERANGAN KONDISI AKHIR TARGET	KETERANGA N LAINNYA	
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	1	2	30.514.000	3	61.601.077	-	-	-	-	-	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 5 unit usaha		
PROGRAM PEMERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					120.000.000		385.000.000		385.000.000		425.866.490	1,00	425.866.490		PROGRAM PRIORITAS	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri (OUTCOME)	Pertumbuhan wirausaha	(jumlah wirausaha tahun n - jumlah wirausaha tahun (n-1)/ jumlah wirausaha tahun (n-1) } *100%	10,00	12,00		14,00		15,00		16,00		17,00		Kondisi akhir s.d 2030 adalah 17 persen		
	Proporsi Jumlah UMKM Non Pertanian pada Level Kabupaten	Proporsi Jumlah UMKM Non Pertanian pada Level Kabupaten*100%	3,09	3,38		3,48		3,58		3,61		3,71		Kondisi akhir s.d 2030 adalah 3,71 persen		
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			60	50	120.000.000	163	385.000.000	173	385.000.000	212	425.866.490	268	425.866.490	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 866 unit		
Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan strategis, fasilitasi perizinan, dan penguatan kelembagaan secara terkoordinasi di tingkat daerah (OUTPUT)	jumlah usaha mikro yang diberdayakan	jumlah usaha mikro yang diberdayakan														
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	3	110.000.000	3	110.000.000	2	130.866.490	2	130.866.490	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 10 unit usaha	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60	-	-	60	105.000.000	60	105.000.000	60	105.000.000	60	105.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 240 Orang	
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	-	50	120.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 250 unit usaha	
	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	50	50.000.000	60	50.000.000	100	70.000.000	156	70.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 366 unit usaha	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				11,67	11,67	430.736.975	13,33	415.500.000	15,00	385.500.000	16,67	385.500.000	18,33	464.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 18,33%	PROGRAM PRIORITAS DAN JANJI POLITIK



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												
					2026		2027		2028		2029		2030		KETERANGAN KONDISI AKHIR TARGET	KETERANGA N LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Meningkatnya daya saing UMKM (OUTCOME)	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	(Jumlah UKM yang Menjalin Kemitraan/Jumlah total UKM yang difasilitasi)*100%															
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				60	60	430.736.975	60	415.500.000	60	385.500.000	60	385.500.000	61	464.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 61 unit	KEGIATAN JANJI POLITIK	
Meningkatnya jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil melalui program pengembangan usaha secara terarah dan berkelanjutan (OUTPUT)	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi															
Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	78.500.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 1 lembaga	
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		60	60	430.736.975	60	415.500.000	60	385.500.000	60	385.500.000	60	385.500.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 300 unit usaha	SUB KEGIATAN JANJI POLITIK	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				0,71	0,71	62.077.500	0,69	66.050.000	0,67	416.050.000	0,65	516.050.000	0,63	516.050.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 0,63 %		
Meningkatnya Pengendalian Stabilitas Harga kebutuhan Barang Pokok dan penting (OUTCOME)	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	[Harga Barang Pokok Bulan n - Harga Barang Pokok Bulan (n-1) / Harga Barang Pokok Bulan (n-1)] *100%															
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah				13	13	47.077.500	13	49.050.000	13	49.050.000	13	49.050.000	13	49.050.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 13 hari		
Tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting secara stabil, merata, dan terjangkau di tingkat daerah guna mendukung ketahanan ekonomi masyarakat (OUTPUT)	Jumlah Ketersediaan Bapokting (Hari)	Jumlah Ketersediaan Bapokting (Hari)															
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Agen dan Pasar Rakyat		4	4	47.077.500	4	49.050.000	4	49.050.000	4	49.050.000	4	49.050.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 20 laporan		
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					-	-	-	-	-	0,67	350.000.000	0,65	450.000.000	0,63	450.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 0,63 %	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												
					2026		2027		2028		2029		2030		KETERANGAN KONDISI AKHIR TARGET	KETERANGA N LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Terkendalinya harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar kabupaten/kota guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. (OUTPUT)	Percentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok	Percentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok														
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi PasarReguler dan PasarKhusus yang Berdampak dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi PasarReguler dan PasarKhusus yang Berdampak dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	2	350.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 6 laporan	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	100	15.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100 %
	Meningkatnya efektivitas pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi dalam rangka menjamin ketersediaan dan ketepatan distribusi bagi petani di wilayah kabupaten/kota (OUTPUT)	Percentase realisasi pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten	Percentase realisasi pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten														
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-	1	15.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 5 laporan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				7,14	7,14	305.133.918	7,14	350.000.000	7,14	400.000.000	7,14	520.000.000	7,14	700.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 35,71%		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi (OUTCOME)			Percentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	(Jumlah Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya / jumlah total sarana perdagangan yang ada)*100%													
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			64	70	305.133.918	80	350.000.000	80	400.000.000	85	520.000.000	85	700.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 85 %		
	Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola secara optimal untuk mendukung kelancaran arus barang, pemerataan distribusi, dan peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha di daerah (OUTPUT)	Percentase sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Percentase sarana distribusi perdagangan yang dikelola	(Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dikelola/Jumlah Total Sarana Distribusi Perdagangan yang Ada)*100%													
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9	10	305.133.918	11	350.000.000	11	400.000.000	12	520.000.000	13	700.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 13 unit		
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				-	100	125.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	90.446.318	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100 %		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2026		2027		2028		2029		2030		KETERANGAN KONDISI AKHIR TARGET	KETERANGA N LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk (OUTCOME)	Percentase penanganan pengaduan konsumen	(Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani/Jumlah Total Pengaduan Konsumen yang Diterima terkait UTTP)*100%														
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				-	150	125.000.000	250	150.000.000	250	150.000.000	250	150.000.000	100	90.446.318	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 1000 unit	
Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan metrologi legal terhadap UTTP guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen di bidang perdagangan (OUTPUT)	Percentase alat-alat ukur, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera	(Jumlah UTTP yang Ditera/Jumlah Total UTTP yang wajib Ditera)*100%														
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur,Alat Takar,Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur,Alat Takar,Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-	150	125.000.000	250	150.000.000	250	150.000.000	250	150.000.000	100	90.446.318	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 1000 unit		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				100	100	10.576.860	100	15.500.000	100	25.500.000	100	25.500.000	100	25.500.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100 %	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha (OUTCOME)	Percentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	(Jumlah Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi/jumlah permohonan izin usaha perdagangan yang masuk)*100%														
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				11	30	10.576.860	30	15.500.000	30	25.500.000	30	25.500.000	30	25.500.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 150 izin	
Terbitnya dokumen perizinan pengelolaan dan operasional pasar rakyat, pusat perbelanjaan, serta toko swalayan sebagai bentuk fasilitasi pemerintah daerah dalam mendukung iklim usaha yang kondusif (OUTPUT)	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan														
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11	30	10.576.860	30	15.500.000	30	25.500.000	30	25.500.000	30	25.500.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 150 dokumen		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						815.000.000		615.000.000		615.000.000		715.000.000		715.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 21 %	PROGRAM PRIORITAS DAN JANJI POLITIK



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2026		2027		2028		2029		2030		KETERANGAN KONDISI AKHIR TARGET	KETERANGA N LAINNYA
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya realisasi pembangunan industri (OUTCOME)	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	(Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 / jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) *100%	3	9		12		15		18		21			
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Level Kabupaten	(Jumlah industri kecil dan menengah level kabupaten/Jumlah Industri besar) *100%	100	99,20		99,93		99,93		99,93		99,94		Kondisi akhir s.d 2030 adalah 99,94 %	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			100	100	815.000.000	100	615.000.000	100	615.000.000	100	715.000.000	100	715.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100 %	KEGIATAN JANJI POLITIK
Tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan dilaksanakannya evaluasi berkala untuk menjamin keselarasan program dengan kebutuhan dan potensi daerah (OUTPUT)	Persentase Penyusunan dan evaluasi pembangunan industri	(Jumlah Dokumen yang Disusun dan Dievaluasi/jumlah total dokumen yang direncanakan)*100%													
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi-Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan		-	20	65.000.000	20	65.000.000	20	65.000.000	20	65.000.000	20	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100 dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		5	5	750.000.000	5	550.000.000	5	550.000.000	5	650.000.000	5	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 25 dokumen	SUB KEGIATAN JANJI POLITIK
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			56	70	47.000.000	75	47.000.000	85	47.000.000	95	47.000.000	100	47.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100 persen	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri (OUTCOME)	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Jumlah informasi industri yang lengkap, akurat dan terkini *100%													
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			10	10	47.000.000	10	47.000.000	10	47.000.000	10	47.000.000	10	47.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 50 dokumen	



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												
					2026		2027		2028		2029		2030		KETERANGAN KONDISI AKHIR TARGET	KETERANGA N LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Tersedianya data dan informasi industri yang akurat dan terkini untuk mendukung proses penerbitan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI sesuai kewenangan Kabupaten/Kota (OUTPUT)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)														
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)	10	10	47.000.000	10	47.000.000	10	47.000.000	10	47.000.000	10	47.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 50 dokumen		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				3,33	3,36	1.330.000.000	3,39	1.345.000.000	3,42	1.230.000.000	3,45	838.000.000	3,48	816.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 17,1 %	PROGRAM PRIORITAS DAN JANJI POLITIK
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja (OUTCOME)		Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	(Jumlah penganggur yang difasilitasi mendapatkan pelatihan pada tahun n / Jumlah penganggur keseluruhan di tahun n) * 100%														
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				20	20	1.330.000.000	20	1.345.000.000	20	1.230.000.000	20	838.000.000	20	816.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100 penganggur	KEGIATAN JANJI POLITIK
	Terlaksananya pelatihan tenaga kerja dengan pendekatan berbasis unit kompetensi sebagai upaya peningkatan kualitas SDM yang tersertifikasi (OUTPUT)	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n														
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		20	20	315.000.000	20	323.000.000	20	280.000.000	20	314.000.000	20	314.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100 orang	SUB KEGIATAN JANJI POLITIK
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja		20	1	1.015.000.000	1	1.022.000.000	1	950.000.000	1	524.000.000	1	502.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 5 unit	SUB KEGIATAN JANJI POLITIK
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					10,24	13,64	172.367.247	13,64	176.000.000	15,38	136.000.000	15,38	156.000.000	17,19	161.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 75,23 %	PROGRAM PRIORITAS



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2026		2027		2028		2029		2030		KETERANGAN KONDISI AKHIR TARGET	KETERANGA N LAINNYA
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja (OUTCOME)	Percentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	(Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL/jumlah total tenaga kerja yang terdaftar dan belum ditempatkan)*100%													
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				21	18	172.367.247	18	176.000.000	20	136.000.000	20	156.000.000	22	161.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 98 tenaga kerja
Terlaksananya pelayanan antar kerja bagi pencari kerja dan pengguna tenaga kerja di wilayah Kabupaten/Kota untuk mempertemukan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja secara efektif (OUTPUT)	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL													
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		21	18	172.367.247	18	176.000.000	20	136.000.000	20	156.000.000	22	161.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 98 orang
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						817.505.000		794.219.100		837.947.654		941.991.511		964.918.913	PROGRAM JANJI POLITIK
Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi (OUTCOME)	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial		3.159	3.170		3.175			3.180		3.185			Kondisi akhir s.d 2030 adalah 3190 tenaga kerja
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Percentase pekerja yang mendapatkan kepesertaan jaminan sosial	Percentase pekerja yang mendapatkan kepesertaan jaminan sosial		96,1	96,7		97,0			97,05		97,08		97,2	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 97,2 persen
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				100	100	67.073.000	100	69.584.000	100	71.110.001	100	73.277.001	100	74.110.003	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100 persen
Terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama bagi perusahaan yang beroperasi dalam satu wilayah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (OUTPUT)	persentase peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama yang disahkan	(jumlah peraturan perusahaan dan PKB yang disahkan/jumlah permohonan yang diajukan)*100%													
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		1	2	9.650.000	2	11.023.000	2	12.421.001	2	12.653.001	2	12.856.003	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 10 perusahaan



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN KONDISI AKHIR TARGET	KETERANGA N LAINNYA
						2026		2027		2028		2029		2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	-	13	12.423.000	13	13.561.000	13	13.689.000	13	15.624.000	13	16.254.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 65 perusahaan	
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah,dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah,dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 5 laporan	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota			100	100	750.432.000	100	724.635.100	100	766.837.653	100	868.714.510	100	890.808.910	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100 %	KEGIATAN JANJI POLITIK
		Terlaksananya upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah Kabupaten/Kota secara tepat, adil, dan sesuai peraturan perundang-undangan (OUTPUT)	persentase Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota yang dicegah dan diselesaikan	(jumlah kasus yang diselesaikan/total kasus terjadi)*100													
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	5	42.031.000	5	36.234.100	5	40.857.510	5	40.857.510	5	40.857.510	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 25 perkara yang dicegah	
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	2	3	30.218.000	3	30.218.000	3	35.689.000	3	35.689.000	3	35.689.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 15 perkara yang diselesaikan	
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	1	135.241.000	1	115.241.000	1	115.971.143	1	157.128.000	1	158.256.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 5 lembaga	
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.943	2.589	542.942.000	2.589	542.942.000	2.700	574.320.000	3.150	635.040.000	3.254	656.006.400	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 3254 orang	SUB KEGIATAN JANJI POLITIK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					-	10	50.000.000	15	50.000.000	17	50.000.000	19	68.467.000	22	74.213.000	Kondisi akhir s.d 2030	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																																																																											
				2026		2027		2028		2029		2030		KETERANGAN KONDISI AKHIR TARGET	KETERANGA N LAINNYA																																																																
1	2	3	4	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	15	16																																																																
	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi (OUTPUT)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya											adalah 22 persen																																																																	
	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota			-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	68.467.000	100	74.213.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 100 persen																																																																
	Terlaksananya penataan persebaran penduduk dari dalam wilayah Kabupaten/Kota guna mendukung pemerataan pembangunan dan pengendalian kepadatan penduduk (OUTPUT)	Percentase persebaran penduduk yang ditata	(jumlah penduduk yang ditata/total penduduk sasaran penataan)*100%																																																																												
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilakukan monitoring dan evaluasi	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	68.467.000	1	74.213.000	Kondisi akhir s.d 2030 adalah 1 lokasi																																																																
TOTAL KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF SETIAP TAHUN				2026	11.857.017.773	2027	12.094.158.128	2028	12.331.298.484	2029	12.568.438.839	2030	12.805.579.195																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">KETERANGAN WARNA</td> <td colspan="15"></td> </tr> <tr> <td>PROGRAM (OUTCOME)</td> <td colspan="15"></td> </tr> <tr> <td>KEGIATAN (OUTPUT)</td> <td colspan="15"></td> </tr> <tr> <td>SUB KEGIATAN</td> <td colspan="15"></td> </tr> </table>																KETERANGAN WARNA																PROGRAM (OUTCOME)																KEGIATAN (OUTPUT)																SUB KEGIATAN															
KETERANGAN WARNA																																																																															
PROGRAM (OUTCOME)																																																																															
KEGIATAN (OUTPUT)																																																																															
SUB KEGIATAN																																																																															



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam urusan koperasi & umkm, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi, DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas mengampu pelaksanaan sejumlah program prioritas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab isu-isu strategis daerah, memperkuat pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta mendukung arah kebijakan nasional dan provinsi. Adapun program prioritas yang dimaksud dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:



Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4		5
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4		5
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4		5
5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota		
6	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		
			Pelayanan antar Kerja		



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra DKUMPP Kap. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

Indikator Kinerja Utama DKUMPP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD diuraikan dibawah ini:



Tabel 4. 4 (Tabel T-C.28) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	
2	Nilai SAKIP	Angka	67,3	67,5	68	68,72	70,46	71,86	
3	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	0,17	0,18	0,200	0,21	0,22	0,24	
4	Persentase pertumbuhan pelaku IKM dan UMKM yang bergerak pada sektor maritim dan pariwisata	%	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	
5	Nilai ekspor perdagangan produk unggulan daerah berbasis maritim dan pariwisata	US \$	1.125.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000	



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,19	2,16	2,13	2,09	2,06	2,02	
7	Rasio penduduk yang bekerja	%	97,81	97,84	97,87	97,91	97,94	97,98	



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, DKUMPP juga berperan penting dalam melaksanakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah, IKK ini bersifat proses dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan yang telah diamanatkan DKUMPP. Adapun IKK dari DKUMPP dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
1	Jumlah penganggur yang dilatih	orang	0	20	20	20	20	20	Target akhir adalah 100 orang
2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	13,64	13,64	13,64	15,38	15,38	17,19	Target akhir adalah 17,19 %
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
3	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	%	11	11,67	13,3	15	16,6	18,3	Target akhir adalah 18,33 %
4	Persentase koperasi aktif	%	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	Target akhir adalah 6,25 %



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,152	0,365	0,579	0,793	0,864	1,006	Target akhir adalah 1,006 %
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
6	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	0,71	0,71	0,69	0,67	0,65	0,63	Target akhir adalah 0,63 %
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									
7	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	3	3	3	3	3	3	Target akhir adalah 3 %
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi									
8	Jumlah kawasan transmigrasi yang	Kawasan	1	1	1	1	1	1	Target akhir



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	difasilitasi penetapannya								adalah 1 kawasan



BAB V PENUTUP

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas menyusun rencana strategis sebagai panduan utama dalam mengelola sektor koperasi, usaha mikro dan kecil, perdagangan, perindustrian hingga ketenagakerjaan dan transmigrasi secara efektif dan berkelanjutan. Melalui Renstra ini, diharapkan DKUMPP mampu mendorong penguatan daya saing ekonomi lokal, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta mengoptimalkan potensi daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Strategi yang terfokus pada pemberdayaan dan inovasi diharapkan menjadi pijakan dalam menghadapi tantangan pembangunan sekaligus menciptakan peluang baru bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Anambas.

Kontribusi kinerja DKUMPP sangat diharapkan dalam mendukung suksesnya pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Melalui kolaborasi yang erat dengan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, DKUMPP berkomitmen untuk memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja DKUMPP diharapkan dapat memperkuat sektor ekonomi lokal sebagai pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Tarempa, 15 September 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perdagangan dan Perindustrian



Dr. MASYKUR, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197811012003121011